

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN  
PERKEBUNAN TA. 2020**



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN  
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
2021**

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini berisikan pelaksanaan tugas pokok dan peran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam meningkatkan peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional, meningkatkan penguasaan pasar di dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta menguatkan struktur industri hasil hutan dan perkebunan.

Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat selain sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan selama tahun 2020, juga sebagai informasi dalam meneruskan dan meningkatkan pembinaan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini saya selaku pimpinan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2020 dapat terlaksana dengan baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat-Nya kepada kita dalam memajukan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sebagai Kekuatan Ekonomi dan Industri Nasional.

Jakarta, 10 Februari 2021

Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro pada Tahun 2020. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran akuntabilitas kinerja ini didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 20120. Dokumen perjanjian kinerja disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020-2024 Perubahan.

### **A. Akuntabilitas Kinerja**

Secara umum Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan melalui keberhasilan dalam pencapaian sasaran maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk Tahun 2020. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020. Pada Tahun Anggaran 2020, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memiliki 1 (satu) sasaran strategis yang dilihat dari sisi tujuan, 2 (dua) sasaran strategis yang dilihat dari perspektif pemangku kepentingan, 1 (satu) sasaran strategis dari perspektif proses internal dan 1 (satu) sasaran dari perspektif pembelajaran organisasi, dengan IKU dan targetnya masing – masing. Pada Perjanjian Kinerja 2020, perspektif tujuan terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator kinerja, perspektif pemangku kepentingan terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang tidak dapat tercapai pada Tahun Anggaran 2020 adalah capaian Nilai Investasi sektor industri hasil hutan dan

perkebunan besar sedang yang tumbuh. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh:

1. Faktor yang berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan realisasi investasi adalah pertumbuhan ekonomi dunia yang melemah (proyeksi Lembaga Moneter Internasional yakni IMF (*International Monetary Fund*) yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di 2019 menjadi 3% dari sebelumnya 3,2%) tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan volume perdagangan akibat ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok serta berkurangnya kegiatan produksi di banyak negara. faktor ini sangat berdampak terhadap investasi, selain iklim investasi dan regulasi terkait investasi.
2. Investasi yang melambat juga dipengaruhi oleh regulasi yang terkait penanaman modal, kedua adalah regulasi perpajakan, ketiga adalah perizinan lahan di daerah, keempat adalah regulasi tentang ketenagakerjaan. sehingga realisasi investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing akan sulit dicapai.

Indikator lain yang secara tidak langsung terkait justru menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu kontribusi ekspor komoditi industri hasil hutan dan perkebunan;

1. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional pada tahun 2019 adalah sebesar 17,61% dari yang ditargetkan sebesar 10,48%. Kenaikan nilai ekspor juga dipengaruhi oleh naiknya harga komoditas. Sebab, ekspor Indonesia masih sebagian besar berasal dari komoditas seperti batubara, nikel dan tembaga. Berdasarkan data BPS, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari– November 2019 turun 3,55 persen dibanding periode yang sama tahun 2018, dan ekspor hasil tambang dan lainnya turun 16,35 persen. Sementara ekspor hasil pertanian naik 3,50 persen. Sementara itu, Ekspor nonmigas November 2019 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US\$2,42 miliar, disusul Amerika Serikat US\$1,48 miliar dan Jepang US\$1,11 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 38,81 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar US\$1,14 miliar.
2. Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan yang signifikan mengikuti peningkatan produksi dan

ekspor sektor pengolahan, yaitu sebesar Rp 319,57 juta per orang per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditargetkan sebesar Rp 288,1 juta per orang per tahun.

Selain sasaran strategis di atas, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memiliki 1 (satu) sasaran strategis yang dijadikan indikator kinerja tujuan dengan 3 (tiga) indikator kinerja tujuan. Indikator tujuan tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan, yaitu: Kontribusi PDB Industri pengolahan hasil hutan terhadap PDB nasional yang ditargetkan 1,6 persen pada tahun 2019, terealisasi sebesar 1,44 persen. Laju pertumbuhan PDB yang ditargetkan sebesar 2,54 persen terealisasi sebesar 2,07 persen. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh:

1. Kontribusi PDB Industri pengolahan hasil hutan terhadap PDB nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, sedikit pengaruh negative, maka akan sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Hilirisasi industri belum berjalan efektif, banyak faktor yang mempengaruhi program hilirisasi, yaitu; regulasi terkait bahan baku, tata niaga terkait bahan baku, regulasi mengenai pengelolaan lahan, dan hal lain yang terkait.
2. Indonesia merupakan negara dengan bahan baku industri yang melimpah, namun belum dapat memanfaatkan dengan baik, sehingga bahan baku tersebut memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan memiliki harga produk yang lebih stabil pada perdagangan internasional. Keterbatasan hilirisasi tersebut dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah regulasi dari instansi-instansi terkait, bukan hanya di Kementerian Perindustrian.

Hal tersebut mempengaruhi kinerja industri pengolahan, khususnya sektor hasil hutan dan perkebunan, memiliki kontribusi PDB sebesar 1,44 persen dari yang ditargetkan sebesar 1,6 persen begitu juga terhadap penyerapan tenaga kerja, produktifitas yang pertumbuhannya tidak tinggi berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang rendah.

Rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri hasil hutan dan perkebunan” dan “Kinerja Tujuan” adalah dengan cara terus menerus

melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis dimaksud, adapun Output kegiatannya yang ingin dicapai antara lain:

- Investment Catalogue Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- Sni Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- Perusahaan Berbasis Hasil Hutan Dan Perkebunan Yang Menerapkan Standar Mutu
- Rancangan Skkni/kkni Yang Disusun/direvisi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional
- Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional
- Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha
- Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Tarif Bea Keluar Dan Tarif Dana Perkebunan Terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional
- Pengembangan Proses Produksi Dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon
- Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Serta Konsep Desain Industri Furniture Yang Diterima Pasar Internasional
- Pelatihan SDM Di Sektor Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan.

## **B. Akuntabilitas Keuangan**

Pada Tahun 2020, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp 18.825.484.000,-**. Anggaran ini alokasikan untuk membiayai 2 (dua) program/kegiatan, yaitu Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dan Peningkatan Kompetensi SDM Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan.

Realisasi anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 17.494.379.469,-** atau sebesar **92,93** persen, dengan capaian fisik sebesar **91,28** persen.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	2
C. Peran Strategis.....	3
D. Struktur Organisasi .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. Rencana Strategis.....	17
B. Rencana Kinerja.....	31
C. Perjanjian Kinerja .....	36
D. Rencana Program/Kegiatan .....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	44
A. Analisis Capaian Kinerja Dit. IHHP .....	44
B. Analisis Capaian Kinerja Rencana Strategis Dit IHHP .....	56
C. Analisis Capaian Kinerja Program Prioritas .....	59
D. Akuntabilitas Keuangan Dit. IHHP.....	63
BAB IV PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Permasalahan dan Kendala .....	67
C. Rekomendasi.....	68

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1.	Industri Binaan Dit. IHHP Berdasarkan KBLI.....	4
Tabel II.1	Rencana Aksi Pembangunan Industri Prioritas.....	22
Tabel II.2.	Tahapan Pembangunan Industri Prioritas Industri Furniture & Barang Lain dari Kayu.....	24
Tabel II.3.	Tahapan Pembangunan Industri Prioritas.....	26
Tabel II.4.	Target IKU Dit. IHHP 2017 - 2019.....	39
Tabel II.5	Target IKT Dit. IHHP 2017 – 2019.....	30
Tabel II.6	Target Indikator Pembangunan 2015 – 2019.....	30
Tabel II.7	Rencana Kinerja Sasaran Strategis .....	34
Tabel II.8	Rencana Kinerja Pembangunan (RPJM) .....	35
Tabel II.9	IKU Sasaran Strategis Perspektif Stakeholders.....	36
Tabel II.10	Rencana Anggaran Dit. IHHP Tahun 2019 .....	37
Tabel III.1.	Realisasi IKT Dit. IHHP Tahun 2019.....	45
Tabel III.2	Pertumbuhan IHHP 2014 - 2019.....	47
Tabel III.3	Kontribusi IHHP Terhadap PDB Nasional Tahun 2019 .....	47
Tabel III.4	Realisasi IKU Meningkatnya Populasi.....	49
Tabel III.5	Realisasi IKU Meningkatnya Daya Saing .....	52
Tabel III.6	Realisasi IKSS Terlenggaranya Urusan Pemerintahan.....	53
Tabel III.7	Realisasi IKSS Tersusunnya Perencanaan Program.....	54
Tabel III.8	Capaian Indikator Kinerja Perkin Berdasarkan Perspektif.....	55
Tabel III.9	Realisasi Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	55
Tabel III.10	Realisasi Indikator Kinerja Renstra 2015 – 2019 .....	56
Tabel III.11	Capaian Indikator Kinerja Renstra Berdasarkan Perspektif .....	57
Tabel III.12	Realisasi Indikator Pembangunan (RPJM) .....	58
Tabel III.13	Capaian Indikator Pembangunan (RPJM) berdasarkan Sasaran Strategis.....	59
Tabel III.14	Realisasi Target Program Prioritas .....	60
Tabel III.15	Realisasi Anggaran Sasaran Strategis.....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat IHHP.....	16
Gambar 2. Peta Strategi Dit. IHHP 2015 – 2019.....	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Tugas pokok Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Melalui tugas pokok tersebut diharapkan dengan melakukan pembinaan terhadap industri hasil hutan dan perkebunan industri tersebut tumbuh dan berkembang, selain itu bahan baku khususnya dari hasil kehutanan dan perkebunan yang tersedia cukup banyak di dalam negeri, dapat diproses lebih lanjut sehingga nilai tambah yang dihasilkan dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya. Selanjutnya akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa.

Pembinaan tersebut dilakukan kedalam berupa peningkatan sumber daya manusia dan upaya peningkatan pelayanan baik untuk internal Kementerian Perindustrian, instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu pembinaan dilakukan pula terhadap dunia usaha, baik berupa upaya peningkatan iklim usaha, peningkatan teknologi dan mutu produk, peningkatan kerjasama antara industri dengan penyediaan bahan baku dan melakukan promosi produk-produk serta berupaya untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh internal kementerian, instansi terkait, dunia usaha, maupun masyarakat pada umumnya.

Untuk mengetahui program pembinaan yang telah dilakukan oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang telah dicapai berupa perkembangan industri hasil hutan dan perkebunan dalam kurun waktu satu triwulan terakhir, kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh industri hasil hutan dan perkebunan serta program-program yang akan dilakukan satu triwulan kedepan maka perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

## **B. Tugas dan Fungsi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan merupakan salah satu unit di Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Serta dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, bahwa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- d. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
- e. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;

- f. Pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri hasil hutan dan perkebunan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Struktur Organisasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai 4 (empat) Sub Direktorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu :

1. Sub. Direktorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
2. Sub. Direktorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya;
3. Sub. Direktorat Industri Selulosa dan Karet Hulu;
4. Sub. Direktorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan; dan
5. Sub. Bagian Tata usaha.

### **C. Peran Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**

Sebagai bagian dari Industri Nasional, maka Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memiliki peran yang sangat penting bagi pengembangan industri nasional secara keseluruhan. Hal ini mengingat bahwa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan merupakan industri yang mengolah hasil hutan dan perkebunan yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari dalam negeri, sehingga diharapkan industri hasil hutan dan perkebunan mampu meningkatkan nilai tambah yang tinggi di dalam negeri, serta mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi peningkatan ekspor nasional, mengurangi impor, meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta mendorong pengembangan investasi di bidang Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, untuk mewujudkan peran pembinaan tersebut, maka peran Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan meliputi Pembinaan Industri sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 64/M-IND/9/2011 yaitu:

**Tabel. I.1.**  
**Industri Binaan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**

KBLI	Uraian
	<b>Furniture Kayu</b>
31001	Industri Furniture dari Kayu
	<b>Kayu Olahan Lainnya</b>
16102	Industri pengawetan Kayu
16213	Industri Panel Kayu Lainnya
16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu
16222	Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu
16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
16230	Industri Wadah dari Kayu
16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebel
16294	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu
16299	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus lainnya ytdl
	<b>Furniture Rotan</b>
31002	Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu
	<b>Rotan Olahan Lainnya</b>
16103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya
16104	Industri Pengolahan Rotan
16291	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu
16292	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Rotan dan Bambu
	<b>Pulp</b>
17011	Industri Bubur Kertas (pulp)
	<b>Kertas</b>
17012	Industri Kertas Budaya
17013	Industri Kertas Berharga
17014	Industri Kertas Khusus
17019	Industri Kertas Lainnya
17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
17091	Industri Kertas Tissue
	<b>Industri Terkait Kertas</b>
17022	Industri Kemasan dan Kotak Dari Kertas dan Karton
17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Dari Kertas ytdl
18111	Industri Percetakan Umum
18112	Industri Percetakan Khusus
18120	Jasa Penunjang Pencetakan
82920	Jasa Pengepakan
	<b>Karet</b>
22121	Industri Pengasapan Karet
22122	Industri Remiling Karet
22123	Industri Karet Remah (crumb rubber)
	<b>Oleokimia dan Atsiri</b>
20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari hasil Perkebunan:
	• Fatty alcohols,

20294	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatty amine,</li> <li>• Methyl ester sulfonat/biosurfactant,</li> <li>• Biolubricant/rolling oils,</li> <li>• Glycerine based chemical,</li> <li>• Isopropil palmitat(IPP),</li> <li>• Isopropil miristat(IPM),asam stearat/stearic acid,</li> <li>• Biodiesel</li> <li>• Bioetanol</li> <li>• Bioavtur</li> <li>• Biogas dari palm oil mill effluent (POME)</li> <li>• Biomaterial untuk peralatan medis,</li> <li>• Aromatic Building block berbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi</li> <li>• Bioetanol berbahan baku lignosa dan limbah biomassa)</li> </ul> <p><b>Industri Minyak Atsiri</b></p>
-------	--

Adapun kelemahan dan kekuatan industri hasil hutan dan perkebunan dapat dilihat di bawah ini.

### **Industri Furniture**

#### Kekuatan

1. Industri furniture memiliki nilai tambah tertinggi dibandingkan industri pengolahan kayu lainnya.
2. Adanya Pusat Desain Furniture Kayu di Jepara.
3. Adanya terminal kayu di beberapa daerah (di Jateng dan Sulut).
4. Banyaknya jumlah perajin furniture di Indonesia.
5. Masih adanya hutan (HPH, HPK, Perhutani, Hutan Rakyat) sebagai sumber bahan baku.
4. Masih adanya potensi pengembangan bahan baku alternatif (spt: kayu kelapa sawit yg tdk produktif lagi, kayu karet,dll).

#### Kelemahan

1. Lokasi pusat-pusat industri furniture pada umumnya berjauhan dengan lokasi sumber-sumber bahan baku kayu.
2. Makin terbatasnya pasokan bahan baku kayu dengan kualitas yang baik
3. Terbatasnya SDM yang menguasai bidang desain dan teknik produksi.
4. Terbatasnya penguasaan teknologi kayu *engineering (finger joint, laminating)*.
5. Belum optimalnya peranan Pusat Desain dan Terminal Kayu

6. Terbatasnya pameran produk-produk furniture.

#### Kesempatan

1. Besarnya permintaan di DN dan ekspor.
2. Furniture masuk kelompok industri kreatif dan *fashionable*, dinamika pasar cukup tinggi.
3. Pasar Eropa, AS dan Jepang mulai menerapkan regulasi terkait legalitas kayu dan di Indonesia telah memiliki SVLK untuk menembus pasar tersebut

#### Hambatan/Gangguan

1. Tuntutan masalah lingkungan dan *Negative campaign*.
2. Persaingan dengan produk-produk sejenis dari impor.
3. Banyaknya retribusi daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

### **Industri Pengolahan Rotan**

#### Kekuatan

1. Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia. Diperkirakan 85% bahan baku rotan di seluruh dunia dihasilkan oleh Indonesia.
2. Ada kebijakan larangan ekspor rotan asalan, sehingga dapat membantu ketersediaan bahan baku di dalam negeri.
3. Adanya insentif investasi berupa *Tax Allowance*.
4. Adanya Pusat Desain Furniture Rotan di Cirebon.
5. Bahan baku rotan masuk kategori ramah lingkungan.

#### Kelemahan

1. Belum adanya litbang yang khusus meneliti mengenai pemanfaatan rotan, sehingga belum semua rotan yang tumbuh di Indonesia dapat dimanfaatkan.
2. Kurangnya dukungan lembaga Litbang terkait desain dan teknik produksi serta finishing.
3. Terbatasnya SDM yang menguasai bidang desain dan proses produksi.
4. Belum berkembangnya industri pendukung/penunjang seperti: peralatan/permesinan, pisau, cat dan lain-lain yang selama ini banyak dipenuhi dari impor.

#### Kesempatan

1. Peluang pasar furniture rotan, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Saat ini terdapat 350 spesies rotan yang terdapat di Indonesia, dan baru sekitar 53 spesies yang memiliki nilai komersial dan dimanfaatkan oleh industri.

#### Hambatan/Gangguan

1. Masih adanya penyelundupan rotan.
2. Persaingan dengan produk-produk sejenis (khususnya dari China).
3. Adanya saingan dengan rotan sintetis.
4. Habitat rotan mulai tergantikan oleh kegiatan ekonomi lain misalnya perkebunan dan pertanian

### **Industri Pulp Dan Kertas**

#### Kekuatan

1. Daya saing industri pulp & kertas Indonesia cukup tinggi (pulp serat pendek No. 8 dunia, dan kertas No. 6 dunia).
2. Iklim tropis yg memungkinkan tanaman dpt tumbuh lebih cepat.
3. Adanya potensi pengembangan bahan baku (HPK masih cukup luas).
4. Potensi bhn baku non-kayu (abaka, tandan kosong kelapa sawit, dll).
5. Teknologi proses pulp dan kertas telah dikuasai dan hampir semua jenis kertas sudah dapat diproduksi di dalam negeri.
6. Dukungan BBPK dan ATPK.

#### Kelemahan

1. Masih tingginya impor pulp serat panjang.
2. Belum dikuasainya teknologi rancang bangun dan perekayasaan permesinan pulp & kertas.
3. Sulitnya proses perizinan perolehan HTI baru.
4. Masih rendahnya pengumpulan kertas bekas di dalam negeri, sehingga impornya masih tinggi.

#### Kesempatan

1. Jumlah penduduk yg besar dan konsumsi kertas per kapita di Indonesia masih rendah yaitu baru 32,6 kg.
2. Menurunnya peranan NORSCAN (North Scandinavia) sebagai penyuplai utama pulp dan kertas dunia.

#### Ancaman



1. Tuntutan lingkungan (*eco-label*).
2. Berkembangnya teknologi informasi mengarah ke *paperless*.
3. ketentuan impor limbah non B3 dimana kertas bekas sebagai bahan baku industri pulp dikategorikan sebagai limbah

### **Industri Hilir Kelapa Sawit**

#### Kekuatan

1. Luas Kebun
2. Tenaga kerja tersedia
3. Penguasaan Teknologi kebun dan Industri
4. Komitmen dan Standar Lestari (ISPO)
5. Kapasitas terpasang Biodiesel dan Minyak Goreng nasional cukup besar, peluang pertumbuhan masih terbuka lebar
6. Rantai Nilai Produk masih terbuka lebar

#### Kelemahan

1. Produktifitas kebun Relatif Rendah
2. Infrastruktur pendukung masih kurang
3. Diplomasi perlu ditingkatkan
4. Ketergantungan lisensi Teknologi industri hilir
5. Tenaga Kerja terampil dianggap masih kurang
6. Industri 2nd generation biodiesel belum berkembang dengan baik di Indonesia

#### Kesempatan

1. Dukungan Kebijakan Pemerintah
2. Penyerapan pasar domestic dan regional ASEAN
3. Pola Kerjasama bidang sawit (contoh: CPOPC)
4. Mandatory Biodiesel di dalam negeri
5. Dukungan Dana Perkebunan Sawit.
6. Keinginan investor masuk di bidang industri pengolahan masih tinggi.

#### Strategi Maksimalisasi Kekuatan melalui Optimalisasi Peluang

1. Penambahan kebun/industri yang bersertifikat ISPO khususnya di luar Jawa

2. Penguasaan teknologi dan kemampuan SDM industri hulu - hilir dengan dukungan Dana Perkebunan.
3. Pengembangan industri hilir sawit sesuai rantai nilai (oleokimia dan *bioenergy*).
4. Peningkatan kapasitas produksi dan penyerapan biodiesel dalam negeri.
5. Pembentukan paket investasi Industri hilir yang *sustainable* dalam kerangka CPOPC.
6. Pengembangan produk distinctive dari minyak sawit yaitu, minyak goreng merah, *golden nutrient*, dsb.

Strategi Minimalisasi Kelemahan melalui Optimalisasi Peluang

1. Program *Replanting* kebun tua didukung dana perkebunan sawit.
2. Penguatan kapasitas riset dan SDM perkelapasawitan dalam negeri via CPO Fund
3. Perbaikan infrastruktur kebun dan pendukung industri hilir khususnya pelabuhan dan kawasan industri kelas dunia dalam format PPP (Public Private partnership)
4. Peningkatan upaya diplomasi dan *anti negative campaign* bersama negara2 dalam kerangka CPOPC.
5. Pengembangan teknologi *biofuel 2nd generation (green diesel)*.
6. Mengarahkan masuknya investasi di sektor infrastruktur kelas dunia

**D. Struktur Organisasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**

Struktur organisasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tercermin pada Tugas dan Fungsi masing-masing Sub Direktorat sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Direktorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri hasil hutan dan perkebunan; dan
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Direktorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dibantu oleh:

- 1) Seksi Program yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.
  - 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.
2. Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya; dan

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Direktorat Industri Kayu, Rotandan Bahan Alam Lainnya dibantu oleh:

- 1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.
- 2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.

5. Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri selulosa dan karet hulu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri selulosa dan karet hulu; dan
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri selulosa dan karet hulu.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu dibantu oleh:

- 1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah

pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri selulosa dan karet hulu.

2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri selulosa dan karet hulu.

6. Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Nonpangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan nonpangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri,

kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil perkebunan non pangan; dan

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan non pangan.

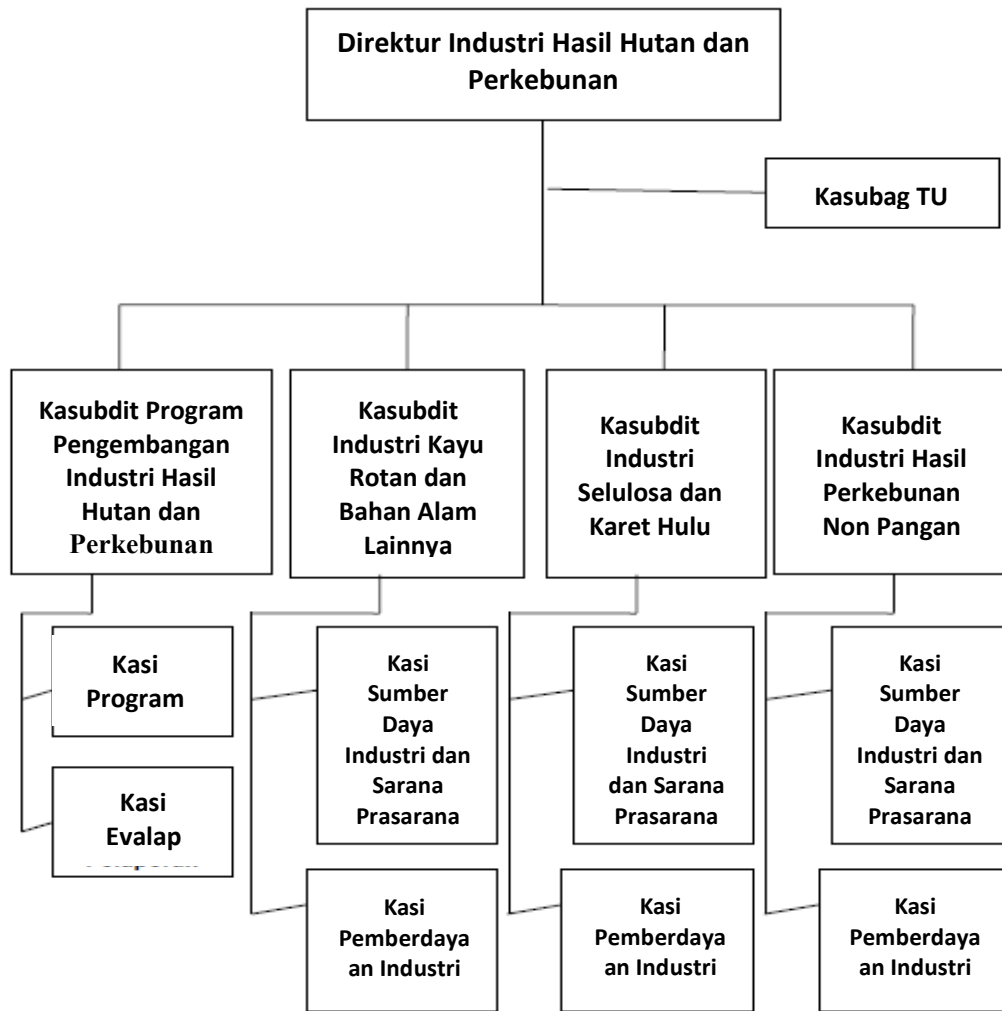
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Subdirektorat Industri Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dibantu oleh:

- 1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil perkebunan nonpangan.
- 2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan

penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industrihijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan non pangan.

7. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.





**Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian merupakan suatu dokumen perencanaan yang disusun untuk dijadikan sebagai alat bantu melaksanakan tugas, fungsi dan pogram kegiatan dan merupakan tolok ukur pencapaian sasaran dan kinerja.

#### 1. Visi

“Mewujudkan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam”.

#### 2. Misi

- 1) Meningkatkan populasi industri untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri hasil hutan dan perkebunan;
- 2) Meningkatkan daya saing dan produktivitas industri untuk mewujudkan industri hasil hutan dan perkebunan yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan.

#### 3. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menetapkan tujuan pembangunan yang akan dicapai sampai tahun 2019, yaitu **Meningkatnya Peran Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam Perekonomian Nasional**, dengan indicator kinerja tujuan, yaitu:

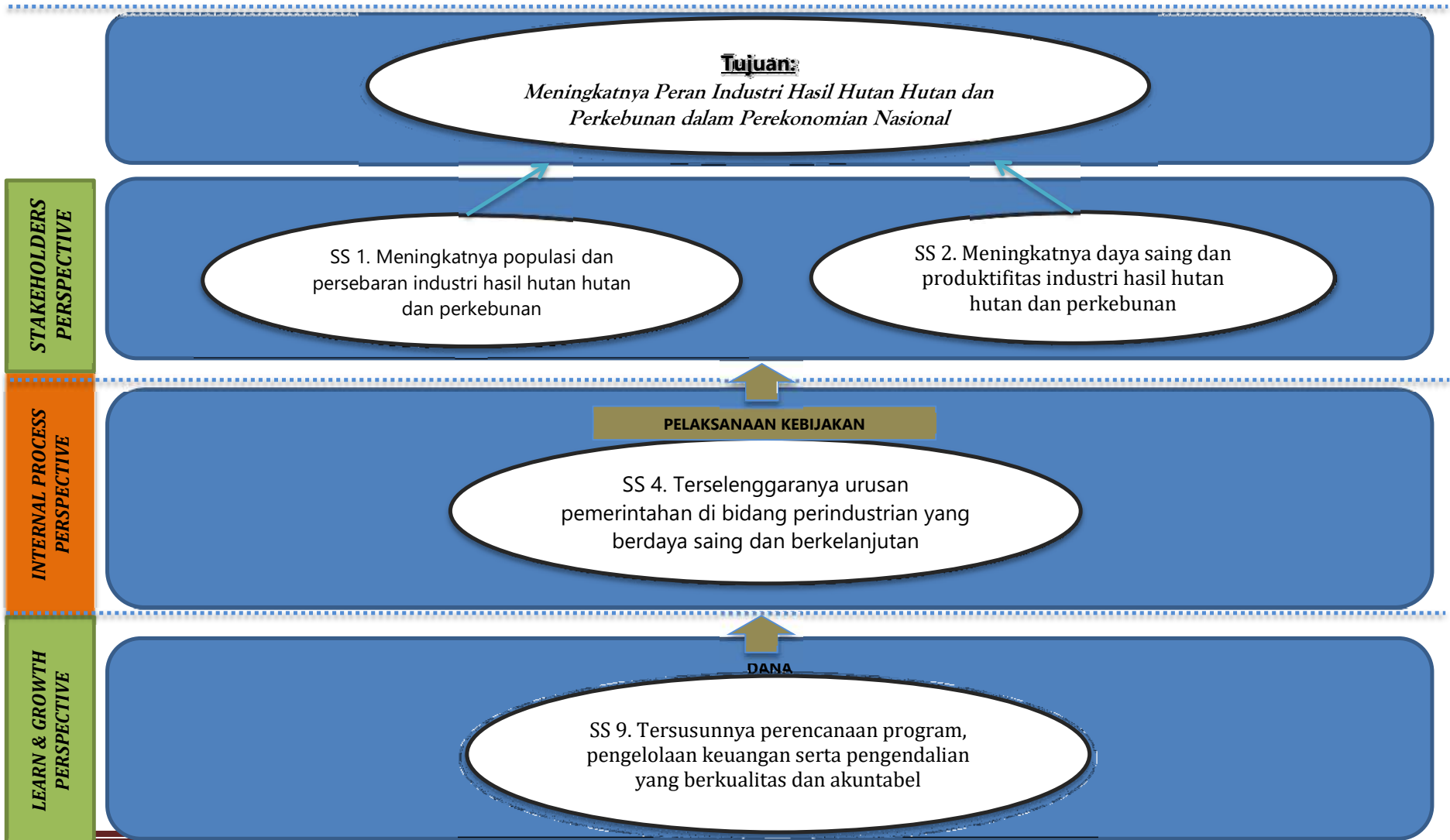
- 1) Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan
- 2) Kontribusi PDB industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional
- 3) Penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan

Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan pada bagian Sasaran Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

4. **Peta Strategi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran industri yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Kementerian Perindustrian, telah dibangun Peta Strategi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang mengacu pada visi dan misi Kementerian Perindustrian. Berikut ini peta strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang menggambarkan hubungan antara tujuan, sasaran strategis dan faktor-faktor yang mendukung pencapaiannya.

## PETA STRATEGI DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019



## 5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 ditetapkan visi pembangunan industri tahun 2020 - 2024 yaitu **“Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam”** dengan fokus prioritas pembangunan industri agro. Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, visi dan misi yang diemban serta mempertimbangkan tantangan-tantangan, permasalahan dan peluang yang ada, maka sebagai **Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Industri hasil hutan dan perkebunan adalah indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dalam perspektif Stakeholders/ pemangku kepentingan, yaitu:**

- 1) Jumlah unit industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh
- 2) Nilai investasi di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan
- 3) Kontribusi ekspor produk industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional
- 4) Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan

## 6. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang akan diwujudkan sampai dengan tahun 2020 adalah:

- 1) Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional
- 2) Meningkatnya daya saing dan kemandirian Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
- 3) Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri hasil hutan dan perkebunan
- 4) Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan perkebunan dalam negeri
- 5) Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan perkebunan

- 6) Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri hasil hutan dan perkebunan
- 7) Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Sasaran 1: Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional Perkebunan, dengan indikator kinerja sasaran, yaitu:

- Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan
- Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional
- Jumlah tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan
- Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan

Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing dan kemandirian Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, dengan indikator kinerja sasaran, yaitu:

- Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total pekerja
- Produktivitas tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan perkebunan
- Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan

Sasaran 3: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri hasil hutan dan perkebunan, dengan indikator kinerja sasaran, yaitu:

- Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi

Sasaran 4: Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan perkebunan dalam negeri, dengan indikator kinerja sasaran, yaitu:

- Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)

- Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan
- Sasaran 5: Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan perkebunan, dengan indikator kinerja sasaran, yaitu:
- Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan
  - Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor
  - Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri non migas
- Sasaran 6: Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri hasil hutan dan perkebunan, dengan indikator kinerja sasaran, yaitu:
- Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri hasil hutan dan perkebunan
- Sasaran 7: Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, dengan indikator kinerja sasaran, yaitu:
- Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional
  - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Sasaran-sasaran tersebut merupakan sasaran strategis dalam cakupan pemangku kepentingan dan proses bisnis internal. Melalui sasaran-sasaran tersebut diharapkan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian.

## **7. Arah, Kebijakan, dan Strategi Pembangunan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2015 – 2019 maka arah kebijakan dan strategi adalah pembangunan industri prioritas. Pembangunan industri prioritas periode tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan mengacu pada rencana aksi yang telah diamanatkan oleh Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Rencana aksi pembangunan untuk masing-masing industri prioritas hasil hutan dan perkebunan dapat dilihat sebagaimana tabel berikutkecuali point (d) Industri Pakan (ransum dan suplemen pakan ternak dan aquaculture) merupakan industri binaan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.

**Tabel II. 1.Rencana Aksi Pembangunan Industri Prioritas IHHPTahun 2020-2024**

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
1.	INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, ALAS KALI DAN ANEKA <b>Industri furnitur dan barang lainnya dari kayu:</b> kerajinan, ukir-ukiran dari kayu, furnitur kayu dan rotan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap IKM dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SVLK);</li> <li>2. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir;</li> <li>3. Menerapkan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif dari (kayu sawit, kayu karet, dsb);</li> <li>4. Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor furnitur;</li> <li>5. Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri furniture rotan dalam negeri.</li> </ol>
2.	<u>INDUSTRI HULU AGRO</u> a. <b>Industri Oleofood:</b> Olein, stearin, gliserol, Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), coco butter substitute, margarin, shortening, other specialty fats. b. <b>Industri Oleokimia:</b> Asam lemak nabati, fatty alcohols fatty amine, methyl ester sulfonat (biosurfactant), biolubricant (rolling oils), gliserin yang berbasis kimia (glycerine based	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai.</li> <li>2. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi</li> <li>3. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP, sertifikasi SNI dan industri hijau dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu</li> <li>4. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk.</li> <li>5. Memfasilitasi penerapan harga keekonomian produk bioenergi.</li> </ol>



NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
	chemicals), Minyak atsiri, Isopropil palmitat (IPP), dan Isopropil Miristat (IPM), Asam stearat (stearic acid) c. <b>Industri Kemurgi:</b> Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/ FAME), Bioavtur (Bio jet fuel). d. <b>Industri Pakan:</b> Ransum dan suplemen pakan ternak dan aquaculture. e. <b>Industri Barang dari Kayu:</b> Komponen berbasis kayu (wood working, laminated & finger joint). f. <b>Industri Pulp dan Kertas:</b> Long fiber, Dissolving pulp.	6. Memberikan insentif khusus untuk industri bioenergi 7. Promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro berwawasan lingkungan di dalam dan luar negeri. 8. Meningkatkan kapasitas produksi pengolahan <i>Palm Oil Mill Effluent(POME)</i> terintegrasi dengan Pabrik Kelapa Sawit untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan mendorong penerapan industri hijau pada industri pulp dan kertas.

Untuk lebih jelasnya pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan diarahkan pada:

### 1. Industri Furniture Kayu

- a) Mendukung pengembangan pemanfaatan teknologi kayu *engineering*.
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan terminal-terminal kayu yang telah ada dan mengembangkan terminal kayu baru di daerah-daerah pusat pengembangan industri furniture yang jauh dari sumber bahan baku kayu.
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan Pusat Desain Furniture Kayu
- d) Memperbanyak frekwensi lomba desain furniture kayu.
- e) Meneruskan pelaksanaan program pameran di dalam dan di luar negeri untuk pengembangan akses pasar dan memelihara konsumen tradisional.

### 2. Industri Pengolahan Rotan

- a) Mempertahan kebijakan larangan ekspor rotan asalan.

- b) Mengoptimalkan pemanfaatan terminal-terminal rotan di daerah-daerah sumber bahan baku.
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan Pusat Desain Furniture Rotan.
- d) Memperbanyak frekwensi lomba desain furniture rotan.
- e) Meneruskan pelaksanaan program pameran di dalam dan di luar negeri untuk pengembangan akses pasar dan memelihara konsumen tradisional.

**Tabel II. 2. Tahapan Pembangunan Industri Prioritas**  
(RIPIN Tahun 2015-2035, PP No 14 Tahun 2015)

Tahapan Pembangunan Industri Furnitur		
2015-2019	2020-2024	2025-2035
<b>Industri Furnitur dan Barang Lainnya Dari Kayu</b>		
1.Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu,  2.Furniture kayu dan rotan	1.High tech furniture kayu dan rotan bersertifikat industri hijau  2.Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu	High value kerajinan dan furniture

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri nasional dilakukan program pengembangan industri prioritas yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta. Program pengembangan industri prioritas disusun untuk periode 2020-2024 dan periode 2020-2035 sebagai berikut:

**Periode 2020-2035**

- a) Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap industri furniture dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SVLK);
- b) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir;

- c) Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk;
- d) Memfasilitasi pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan, dan furnitur;
- e) Menerapkan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif antara lain dari kayu sawit dan kayu karet;
- f) Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor furnitur;
- g) Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri furnitur rotan dalam negeri

**Periode 2020-2035**

- a) Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku (kayu dan rotan) melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan, didukung dengan infrastruktur (transportasi dan pelabuhan) yang memadai;
- b) Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan disain produk furnitur, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual;
- c) Meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas SDM dalam memproduksi kerajinan kayu/rotan;
- d) Mengembangkan standarisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing industri furnitur.

**3. Industri Pulp dan Kertas**

**Tabel II. 3. Tahapan Pembangunan Industri Prioritas**  
(RIPIN Tahun 2015-2035, PP No 14 Tahun 2015)

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		Industri Pulp dan Kertas		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
1.	Industri Hulu Agro	1. <i>Long Fiber</i> 2. <i>Dissolving pulp</i>	Pulp dan aneka barang kertas diproduksi secara ramah lingkungan	<i>microbial cellulose fiber</i>

#### **Periode 2020-2024**

- a) Pada Tahun 2020 telah dilaksanakan identifikasi permasalahan terkait bahan baku kertas
- b) Pembuatan buku pedoman teknis persyaratan dan penanganan bahan baku industri kertas daur ulang di tahun 2020

#### **4. Industri Hilir Kelapa Sawit**

Regulasi Pemerintah:

- a. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Industri Pengolahan Minyak Sawit masuk dalam RIPIN (Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional), mendapatkan Prioritas Pengembangan oleh Pemerintah melalui Insentif Investasi dan fasilitasi lainnya.
- b. Peraturan Menteri Perindustrian No. 13 Tahun 2010 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit

Sasaran Jangka Panjang (2015-2025) :

- Memperluas pengembangan produk akhir
- Terbentuknya *centre of excellence* industri oleokimia
- Penguasa pasar internasional
- Pemantapan industri berwawasan lingkungan
- Terintergrasinya industri turunan kelapa sawit

#### **Kebijakan Operasional Hilirisasi Industri Kelapa Sawit :**

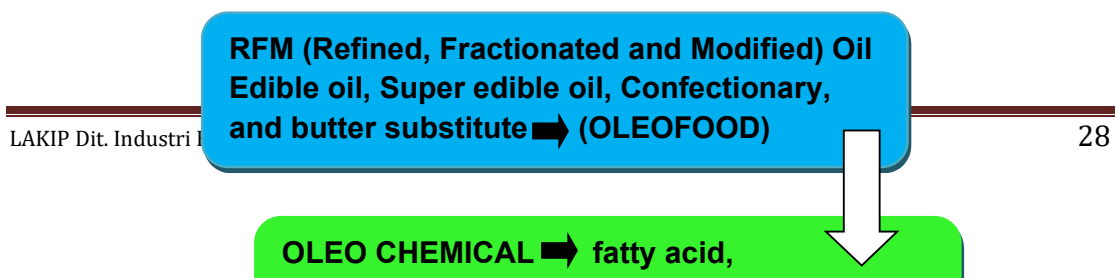
- a. Pemberian Insentif Investasi
  - *Tax Allowance* untuk Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu sesuai (PP Nomor 1 tahun 2007 *jo* PP Nomor 62 Tahun 2008 *jo* PP Nomor 52 Tahun 2011 *jo* PP Nomor 18 Tahun 2015.
  - *Tax Holiday* sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/2011 *jo* PMK Nomor 154 Tahun 2014 *jo* PMK Nomor 159 Tahun 2015

- Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (PMK 76 tahun 2012)
- b. Restrukturisasi Bea Keluar atas Ekspor CPO dan Produk Turunannya (PMK No. 136 Tahun 2015) dan Kebijakan Pungutan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (PMK No. 133 Tahun 2015)
- Diperlukan untuk :
- Menjamin ketersediaan bahan baku minyak sawit mentah bagi industri domestik
  - Mengamankan pasokan serta harga minyak goreng sebagai bahan pokok di dalam negeri
  - Mendukung Program Nasional Hilirisasi Industri Kelapa Sawit

Prinsip restrukturisasi

- Progresif vertikal Tarif BK produk Hulu-*Intermediate* lebih tinggi, berdasarkan Rantai Nilai Industri
  - Progresif Horizontal Tarif BK sejalan dengan harga CPO Internasional, penyeimbang *windfall profit*
  - Pengembalian Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk perbaikan fasilitas infrastruktur perkebunan kelapa sawit, pembangunan industri hilir, infrastruktur kawasan industri khusus sawit dan promosi investasi
- c. Promosi Investasi, Advokasi *Non-Tariff Barrier* dan *Anti Negative Campaign*

**Strategi Pemilihan Produk Hilir yang dikembangkan**



**BIOENERGY Biodiesel, Bioetanol  
From EFB, Bio oil, Bio Jet Fuel, Biomass  
Product, etc**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 31.1/M-IND/PER/3/2015 dan perubahannya Nomor: 85.1/M-IND/PER/12/2016 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 - 2024, maka target pembangunan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel. II.4. Target Indikator Kinerja Utama Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020 - 2024**

Kode	Sasaran Program	Target					Satuan
Tj	<b>Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional</b>						
1	Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan	-0.57	1.02	2.59	3.73	5.39	%
2	Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional	1.50	1.46	1.45	1.43	1.40	%
3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	3.17	3.32	3.49	3.68	3.89	Juta Orang

	4	Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	22.60	24.40	26.42	29.14	32.97	USD Milyar
<b>Perspektif Stakeholder</b>								
<b>SK1</b>	<b>Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan dan perkebunan</b>							
	1	Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total pekerja	2.25	2.52	2.60	2.66	2.75	%
	2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan perkebunan	50.2	50.7	51.0	51.3	51.5	Juta Rupiah/ Orang /Tahun
	3	Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan	14.93	17.00	22.10	28.72	39.85	Rp Trilyun
<b>Perspektif Customer</b>								
<b>SK2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri hasil hutan dan perkebunan</b>							
	1	Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi	1.88	1.91	1.96	1.99	2.04	%
<b>SK3</b>	<b>Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan perkebunan dalam negeri</b>							
	1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	54.75	55.85	56.97	58.10	59.27	%
	2	Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan	2	-	1	1	1	Diversifikasi Produk
<b>SK4</b>	<b>Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan perkebunan</b>							
	1	Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	7.12	7.98	8.26	10.31	13.15	%
	2	Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor	14.40	13.61	13.70	13.79	13.89	%
	3	Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri non migas	2.12	2.03	1.93	1.84	1.75	%
<b>Perspektif Internal Process</b>								

<b>SK5</b>	<b>Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri hasil hutan dan perkebunan</b>							
	1	Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	5	10	17	18	19	Perusahaan
<b>Perspektif <i>Learn &amp; Growth</i></b>								
<b>SK6</b>	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan</b>							
	1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	95.5	96	96.5	97	97.5	%
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	78	78,5	79	79,5	80	Nilai

## **B. Rencana Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenperin telah dibangun peta strategi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang mengacu pada pada visi misi Kementerian Perindustrian. Visi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yaitu mewujudkan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang berdaya saing dengan struktur Industri yang kuat berbasis sumber daya alam. Visi ini kemudian dijabarkan dalam misi yaitu meningkatkan populasi industri untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri hasil hutan dan perkebunan; dan meningkatkan daya saing dan produktivitas industri untuk mewujudkan industri hasil hutan dan perkebunan yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan.



Tujuan yang ingin dicapai adalah **meningkatkan peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional**. Keberhasilan tujuan ini diukur dengan:

- (1) Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan dengan target -0.57 Persen.
- (2) Kontribusi PDB industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional dengan target 1,50 Persen
- (3) Penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan dengan target 3,17 Juta Orang
- (4) Nilai Ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan dengan target Usd 22.60 Milyar

Selain tujuan seperti tersebut di atas ditetapkan pula sasaran strategis dari tujuan dimaksud. sasaran strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020 yaitu:

- **Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan dan perkebunan.** Keberhasilan sasaran ini diukur dengan: (1) Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total pekerja dengan target 2,25 Persen. (2) Produktivitas tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan perkebunan dengan target 50,2 juta rupiah/orang/tahun. (3) Nilai investasi di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan dengan target 14,93 Trilyun Rupiah.
- **Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri hasil hutan dan perkebunan.** Keberhasilan sasaran ini diukur dengan Kontribusi ekspor produk industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi dengan target 1,88%.
- **Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan perkebunan dalam negeri.** Keberhasilan sasaran ini diukur dengan: (1) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) dengan target 54,75%. (2) Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan dengan target 2 Diversifikasi Produk
- **Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan perkebunan** Keberhasilan sasaran ini diukur dengan: (1)

Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan dengan target 7,12%. (2) Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor dengan target 14,4%. (3) Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri non migas dengan target 2,12%.

- **Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri hasil hutan dan perkebunan** Keberhasilan sasaran ini diukur dengan Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri hasil hutan dan perkebunan dengan target 5 perusahaan
- **Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan** Keberhasilan sasaran ini diukur dengan: (1) Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional dengan target 95,5 %. (2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dengan target nilai 78

### **Indikator Kinerja Utama**

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2020, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama tersebut dengan target capaian sebagai berikut.

- (1) Nilai investasi di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan sebesar 14,93 Triliyun Rupiah.
- (2) Kontribusi ekspor produk industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional sebesar 1.88 Persen.
- (3) Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan sebesar 50.2 Juta Rupiah Perorang Pertahun.

## **Kegiatan**

Untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan untuk Tahun 2020, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan merencanakan kegiatan dengan beberapa komponen kegiatan/output yang menjadi pendukung pencapaian sasaran tersebut yaitu kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, dengan 7 (tujuh) Output sebagai berikut.

1. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan.
2. SNI Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan.
3. Rancangan SKKNI/kkni Yang Disusun/direvisi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
4. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional.
5. Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha.
6. Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
7. Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

**Tabel. II.7. Rencana Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020**

<b>Kode</b>	<b>Tujuan/Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi</b>
<b>TUJUAN</b>					
Tj	Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional	1. Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan	2,79	%	(15,12)*
		2. Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional	1,38	%	1,66*
		3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	3,3	Juta Orang	0,90*

		4. Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	16,25	USD Milyar	17,42*
<b>PERSPEKTIF STAKEHOLDER</b>					
SS1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	1. Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total pekerja	2,57	%	0.67*
		2. Produktivitas tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan perkebunan	51,2	Juta Rupiah/ Orang /Tahun	57,11*
		3. Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan	45,38	Rp Trilyun	130,48
SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	1. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi	2,05	%	N/A
SS3	Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan perkebunan dalam negeri	1. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	54,75	%	57,33
		2. Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan	2	Diversifikasi Produk	N/A
SS4	Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan perkebunan	1. Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	9,25	%	(3,92)*
		2. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor	8,75	%	11,87*
		3. Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri non migas	2,23	%	N/A
<b>PERSPEKTIF LEARN &amp; GROWTH</b>					
L1	Meningkatnya kualitas perencanaan,	1. Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan rencana strategis	100	%	100

penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	77	Nilai	71,26
---	--	----	-------	-------

**Tabel. II.8. Rencana Kinerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 - 2024 Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**

No.	Sasaran Program /Indikator	Kegiatan
1.	Meningkatnya Populasi Industri Sedang dan Besar Hasil Hutan dan Perkebunan (Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri)	
1.1	Berkembangnya industri Hasil Hutan dan Perkebunan Lainnya	Bantuan mesin peralatan untuk industri furniture kayu dan rotan, dan alat laboratorium industri pulp & kertas dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri hasil hutan dan perkebunan dan menumbuhkan populasi unit usaha baru dan penyerapan tenaga kerja.
1.2	Tumbuh dan berkembangnya industri oleokimia dan kemurgi	Penyusunan rekomendasi iklim usaha industri hilir perkebunan non pangan (Oleokimia dan Kemurgi) dengan tujuan menumbuhkan populasi unit usaha baru dan penyerapan tenaga kerja dibidang industri oleokimia dan kemurgi.
2.	Meningkatnya daya saing industri Hasil Hutan dan Perkebunan	
2.1	Tersusunnya standar produk industri hasil hutan dan perkebunan	Penyusunan 10 draft RSNi industri pulp & kertas, 4 draf RSNi industri furniture. Sedangkan untuk 1 draft RSNi industri hilir perkebunan non pangan (Oleokimia dan Kemurgi) dengan tujuan meningkatkan daya saing produk industri hasil hutan dan perkebunan di dalam negeri maupun luar negeri.
2.2	Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di dalam negeri maupun luar negeri	Berpartisipasi dalam forum/sidang/promosi/pameran dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar calon investor tertarik menanamkan investasinya di Indonesia.

### C. Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, dan didukung oleh anggaran yang sah dalam DIPA, maka ditetapkan kinerja yang akan dicapai. Penetapan kinerja merupakan kontrak kerja antara pimpinan satuan kerja yang lebih tinggi kepada pimpinan satuan kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran dan indikator kinerja. Perjanjian kinerja disusun dan ditetapkan pada awal tahun anggaran dan dilakukan evaluasi secara berkala minimal 1 kali dalam setahun. Sasaran dan indikator yang akan dicapai pada rencana kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

#### 1. Perspektif Tujuan

No	Tujuan atau Sasaran Progress	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional	1	Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan	-0.57	%
		2	Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional	1.50	%
		3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	3.17	Juta Orang
		4	Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	22.60	USD Milyar

#### 2. Perspektif Pemangku Kepentingan

Tabel II. 9. IKU Sasaran Strategis Perspektif Pemangku Kepentingan

No	Tujuan atau Sasaran Progress	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan dan perkebunan	1	Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total pekerja	2.25	%
		2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan perkebunan	50.2	Juta Rupiah/Orang/Tahun
		3	Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan	14.93	Rp Trilyun

#### 3. Perspektif Customer

No	Tujuan atau Sasaran Progress	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri hasil hutan dan perkebunan	1	Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi	1.88	%
2	Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan perkebunan dalam negeri	1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	54.75	%
		2	Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan	2	Diversifikasi Produk
3	Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan perkebunan	1	Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	7.12	%
		2	Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor	14.40	%
		3	Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri non migas	2.12	%

#### 4. Perspektif Internal Process

No	Tujuan atau Sasaran Progress	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri hasil hutan dan perkebunan	1	Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	5	Perusahaan

#### 5. Perspektif Learn & Growth

No	Tujuan atau Sasaran Progress	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	95.5	%
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	78	Nilai

Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan ditetapkan pada bulan Januari 2020 dan dilakukan revidi terhadap perubahan yang terjadi.

#### **D. Rencana Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020**

Berkaitan dengan tupoksi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memiliki 1 (satu) Kegiatan yaitu "Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan" yang memiliki 7 (tujuh) Output Kegiatan dengan total anggaran **Rp. 15.258.538.000,-** (Lima belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Sejak awal bulan Maret tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi virus corona-19, sehingga diperlukan penyesuaian atas anggaran dan kegiatan untuk penanganan dampak pandemi covid-19 sebesar **Rp 9.831.672.000,-** (Sembilan milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 64,43 persen. Anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan setelah dilakukan revisi adalah sebesar **Rp 5.426.866.000,-** (Lima milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penyesuaian anggaran lanjutan, menjadi sebesar **Rp 4.823.672.000,-** (Empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Tujuh Output Kegiatan dimaksud di atas yaitu:

##### **1) Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan;**

Output ini memiliki 3 (tiga) rekomendasi yang harus diselesaikan, yaitu Rekomendasi Kebijakan dan Insentif Non-fiskal dengan anggaran sebesar **Rp. 775.136.000,-**, dengan kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Penyusunan Rekomendasi Implementasi Industri Aditif Aspal Karet.
- Penyusunan Rekomendasi Implementasi Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan.
- Penyusunan Rekomendasi Insentif Fiskal Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan.



## **2) SNI Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan**

Output ini memiliki 15 (lima belas) volume RSNI yang harus disusun rancangannya, yaitu: 10 RSNI produk pulp dan kertas, 3 RSNI produk furniture, dan 2 RSNI produk hilir perkebunan non pangan.

Kegiatan yang harus diselesaikan ini membutuhkan anggaran sebesar **Rp. 885.956.000,-**, dengan kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Penyusunan Rsn Selulosa Dan Karet;
- Penyusunan Rsni Furnitur Dan Pengolahan Kayu;
- Penyusunan Rsn Hilir Perkebunan Non Pangan;

## **3) Rancangan SKKNI/KKNI Yang Disusun/direvisi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan**

Output ini memiliki 3 (tiga) volume RSKKNI yang harus disusun rancangannya, yaitu 1 RSKKNI di bidang industri Furniture dan Pengolahan Kayu, 1 RSKKNI di bidang industri selulosa dan karet, dan 1 RSKKNI di bidang industri hasil perkebunan non pangan.

Kegiatan yang harus diselesaikan ini membutuhkan anggaran sebesar **Rp. 581.879.000,-**, dengan kegiatan meliputi:

- Penyusunan RSKKNI produk pulp dan kertas
- Penyusunan RSKKNI produk furniture
- Penyusunan RSKKNI hilir perkebunan non pangan

## **4) Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional**

Output pada kegiatan ini sebanyak 3 (tiga) Rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan jaminan pasokan bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan melalui fora kerjasama internasional dengan anggaran sebesar **Rp. 818.588.000,-**, dengan kegiatan:

- Penyusunan Konsep Desain Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Dalam Rangka Industrial Intelligence.
- Penyusunan Rekomendasi Terkait Posisi Runding Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Pada Forum Kerjasama Internasional.

- Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

#### **5) Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha**

Volume Output kegiatan ini adalah 4 (empat) dokumen terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan direktorat industri hasil hutan dan perkebunan, yaitu 1 (satu) Laporan penyusunan dokumen perencanaan pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, 1 (satu) Laporan Identifikasi Isu Aktual Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, 1 (satu) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja IHHP, 1 (satu) Laporan Penerapan Budaya 5K, dengan anggaran sebesar **Rp. 1.121.819.000,-** Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- Identifikasi Isu Aktual Industri Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- Penerapan Budaya 5K Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

#### **6) Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan**

Volume output pada Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan yang ingin dicapai sebanyak 2 (dua) konsep hilirisasi, dengan anggaran sebesar **Rp. 322.994.000,-** melalui kegiatan yaitu:

- Penyusunan Konsep Pengembangan Produk Turunan Minyak Atsiri.
- Penyusunan Konsep Pengembangan Produk Turunan Selulosa Dan Karet.

#### **7) Peningkatan Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas**

Output kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen terkait dengan Panduan Spesifikasi Kertas Bekas sebagai bahan baku industri kertas, dengan anggaran sebesar **Rp. 317.300.000,-**. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Penyusunan konsep panduan spesifikasi kertas bekas meliputi kajian dan penggalian informasi oleh konseptor terhadap industri, asosiasi, instansi pemerintah, LSM maupun stakeholder lainnya serta Penyusunan konsep panduan spesifikasi kertas bekas oleh konseptor.

Untuk mencapai 7 (tujuh) Output tersebut anggaran yang dibutuhkan Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan adalah sebesar **4.823.672.000,-** (Empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) pada Tahun Anggaran 2020.

Adapun matrik kegiatan/komponen input yang akan dikerjakan Direktorat Industri Hasil Hutan dalam menunjang tercapainya Output yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

**Tabel II.10**  
**Rencana Anggaran Tahun 2020**

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
7	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	4.823.672.000
1833	Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	4.823.672.000
1833.031	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	775.136.000
55	<i>Penyusunan Rekomendasi Implementasi Industri Aditif Aspal Karet</i>	232.968.000
56	<i>Penyusunan Rekomendasi Implementasi Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan</i>	127.672.000
57	<i>Penyusunan Rekomendasi Insentif Fiskal Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	414.496.000
1833.032	Sni Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	885.956.000
60	<i>Penyusunan Rsnj Selulosa Dan Karet</i>	444.144.000
61	<i>Penyusunan Rsnj Furnitur Dan Pengolahan Kayu</i>	250.526.000
62	<i>Penyusunan Rsnj Hilir Perkebunan Non Pangan</i>	191.286.000

1833.037	Rancangan Skkni/kkni Yang Disusun/direvisi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	581.879.000
67	<i>Penyusunan/revisi Rancangan Skkni/kkni Industri Furniture Dan Pengolahan Kayu</i>	237.254.000
68	<i>Penyusunan/revisi Rancangan Skkni/kkni Industri Selulosa Dan Karet</i>	308.575.000
69	<i>Penyusunan/revisi Rancangan Rskkni/kkni Industri Hasil Perkebunan Non Pangan</i>	36.050.000
1833.053	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional	818.588.000
51	<i>Penyusunan Konsep Desain Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Dalam Rangka Industrial Intelligence</i>	378.955.000
52	<i>Penyusunan Rekomendasi Terkait Posisi Runding Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Pada Forum Kerjasama Internasional</i>	131.729.000
53	<i>Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	307.904.000
1833.056	Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha	1.121.819.000
1	Dokumen Program, Evaluasi Dan Pelaporan	1.023.644.000
51	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	351.556.000
52	<i>Identifikasi Isu Aktual Industri Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	273.134.000
53	<i>Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	398.954.000
2	Layanan Tata Usaha	98.175.000
51	<i>Penerapan Budaya 5 K Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	98.175.000
1833.071	Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	322.994.000
1	Tanpa Suboutput	322.994.000
78	<i>Penyusunan Konsep Pengembangan Produk Turunan Minyak Atsiri</i>	161.376.000
79	<i>Penyusunan Konsep Pengembangan Produk Turunan Selulosa Dan Karet</i>	161.618.000
1833.072	Peningkatan Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas	317.300.000
51	<i>Peningkatan Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas</i>	317.300.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.823.672.000</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Analisis Capaian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020**

Secara umum Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan yang diwujudkan melalui keberhasilan dalam pencapaian target-target sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2020. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan target atas indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran pada awal tahun seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020.

Penilaian atas pelaksanaan tugas Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2020 yang dijelaskan pada BAB II yaitu meningkatkan peran industri dalam perekonomian nasional, ukuran keberhasilan tujuan ini dihitung melalui indikator tujuan yaitu laju pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan, kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional, dan penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan non-migas dengan capaian tertera dalam tabel berikut.

**Tabel. III.1. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan (IKT) dari Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional**

Indikator Kinerja		2020		2021	2022	2023	2024	Satuan
		Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan	-0.57	-3.03	1.02	2.59	3.73	5.39	%
2	Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional	1.50	1.38	1.46	1.45	1.43	1.40	%
3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	3.17	2.77	3.32	3.49	3.68	3.89	Juta Orang
4	Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	22.60	19.10	24.40	26.42	29.14	32.97	USD Milyar

Sasaran strategis Meningkatnya Peran Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam Perekonomian Nasional bertujuan untuk melihat kontribusi industri hasil hutan dan perkebunan terhadap pembangunan industri nasional. Pencapaian tujuan ini diukur dengan “laju pertumbuhan PDB industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan”.

Penghitungan PDB ini atas dasar harga berlaku yang dipublikasikan oleh BPS. Target indikator ini pada tahun 2020 adalah -0.57. persen dan terealisasi sebesar -3.03 persen dengan capaian sebesar 81,5 persen. Sedangkan tahun sebelumnya terealisasi sebesar 2,77 persen dari 2,54 persen yang ditargetkan dengan capaian sebesar 81.5%.

Capaian untuk tahun 2020, industri hasil hutan dan perkebunan mengalami pertumbuhan positif sebesar 0.22 persen dari kategori industri yaitu Industri kertas dan barang dari kertas tumbuh; Industri karet, barang dari karet dan plastik tumbuh negatif sebesar -5.81 persen; serta industri furniture tumbuh negatif sebesar -3.36 persen.

“Kontribusi industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional” tahun 2020 adalah 1,38% sama dengan tahun 2019 yaitu sebesar 1,38%. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan berkontribusi sebesar 22% terhadap industri agro.

Kontribusi PDB Industri pengolahan hasil hutan terhadap PDB nasional yang ditargetkan 1,5 persen pada tahun 2020, terealisasi sebesar 1,38 persen dengan capaian 92 persen.

Kontribusi PDB Industri pengolahan hasil hutan terhadap PDB nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, terutama karena ada dampak dari covid19 terdapat banyak pengaruh negatif, maka akan sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Hilirisasi industri belum berjalan efektif, banyak faktor yang mempengaruhi program hilirisasi, yaitu; regulasi terkait bahan baku, tata niaga terkait bahan baku, regulasi mengenai pengelolaan lahan, dan hal lain yang terkait.

Indonesia merupakan negara dengan bahan baku industri yang melimpah, namun belum dapat memanfaatkan dengan baik, sehingga bahan baku tersebut memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan memiliki harga produk yang lebih stabil pada perdagangan internasional. Keterbatasan hilirisasi tersebut dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah regulasi dari instansi-instansi terkait, bukan hanya di Kementerian Perindustrian.

Hal tersebut mempengaruhi kinerja industri pengolahan, khususnya sektor hasil hutan dan perkebunan, memiliki kontribusi PDB sebesar 1,38 persen dari yang ditargetkan sebesar 1,50 persen begitu juga terhadap penyerapan tenaga kerja, produktifitas yang pertumbuhannya tidak tinggi, berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang belum optimal, target juga belum tercapai masih di angka 0.4 juta jiwa selisih antara target dengan pencapaian.

Selain 2 (dua) indikator tersebut di atas, sasaran strategis Meningkatnya Peran Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam Perekonomian Nasional dikukur pula dengan “penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan”. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan sampai dengan saat ini. Indikator

kinerja ini diukur dengan melakukan penghitungan realisasi berdasarkan data BPS dan SPPISE-BKPM, sampai dengan tahun 2020. Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan tahun 2020 sebanyak 2,77 juta tenaga kerja dari yang ditargetkan sebesar 3.17 juta tenaga kerja, sedangkan Tahun 2019 sebanyak 2,77 juta tenaga kerja, dengan capaian sebesar 87,38 persen. Data ini berdasarkan data dari Industri Besar Sedang dan Industri Menengah Kecil yang dtelah diolah oleh Pusdatin Kementerian Perindustrian.

Dari penjelasan di atas tujuan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam “Meningkatnya Peran Industri Hasil Hutan dan Perkebunan” dalam Perekonomian Nasional dapat dikatakan tercapai sesuai target.

**TABEL III.2. PERTUMBUHAN INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2020**

(dalam%)

NO	LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019
1	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-1,63	1,80	1,63	1,56	-1,30
2	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-0,16	2,16	-1,49	4,8	6,94
3	Industri Furnitur	5,17	0,47	5,47	1,07	6,93
<b>Jumlah Industri Hasil Hutan dan Perkebunan</b>		<b>3,38</b>	<b>4,43</b>	<b>5,61</b>	<b>7,43</b>	<b>2,07</b>
Industri Non Migas		5,05	4,42	5,49	5,01	4,68
Produk Domestik Bruto (PDB)		4,88	5,02	5,06	5,17	5,02

Sumber: BPS diolah Dit.IHHP

Catatan: \*) Angka Sementara

**TABEL III.3. KONTRIBUSI INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN TERHADAP PDB NASIONAL TAHUN 2020**

(dalam%)

NO	LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019
1	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,68	0,65	0,60	3,25	0,54
2	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,76	0,72	0,71	3,94	0,73
3	Industri Furnitur	0,27	0,26	0,25	1,36	0,24
<b>Industri Hasil Hutan dan Perkebunan</b>		<b>1,71</b>	<b>1,63</b>	<b>1,56</b>	<b>2,85</b>	<b>1,38</b>

Sumber: BPS diolah Dit.IHHP

Catatan: \*) Angka Sementara



Pengukuran capaian kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2020 selain melalui keberhasilan tujuan seperti tersebut di atas, diukur pula keberhasilan dari sasaran-sasaran strategis yang tercantum dalam renstra dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan, seperti berikut.

### **Sasaran Strategis Perspektif Pemangku Kepentingan**

Sasaran strategis perspektif *stakeholders* mempunyai 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, meliputi:

#### **1. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan dan perkebunan**

Dalam rangka untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai Indonesia, pemerintah membangun bahan baku di dalam negeri dengan tujuan mengatasi hambatan pasokan bahan baku dan mengurangi bahan baku impor. Sasaran strategis meningkatnya populasi dan persebaran industri hasil hutan dan perkebunan merupakan salah satu parameter untuk mengukur perkembangan kinerja industri dimaksud. Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

- (1) Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total pekerja dengan target 2,25 Persen.
- (2) Produktivitas tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan perkebunan dengan target 50,2 juta rupiah/orang/tahun.
- (3) Nilai investasi di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan dengan target 14,93 Trilyun Rupiah.

Berdasarkan data dari BKPM/ LKPM dan diolah oleh Pusdatin Kementerian Perindustrian terdapat penanaman modal dalam negeri sebesar 9.93 Trilyun Rupiah dan penanaman modal asing sebesar Usd 2,25 Milyar sedangkan berdasarkan data dari BKPM tahun 2019 realisasi investasi sebesar 16,45 Trilyun

Tabel III. 4. Realisasi IKU dari Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan dan perkebunan

Tujuan atau Sasaran Progress	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	
Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan dan perkebunan	1	Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total pekerja	2.25	2.00	%
	2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan perkebunan	50.2	107.0	Juta Rupiah/Orang/Tahun
	3	Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan	14.93	13.08	Rp Trilyun

### **Sasaran Strategis Customer**

Sasaran strategis perspektif Customer mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran, meliputi:

#### **1. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri hasil**

Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi, pada indikator ini kami belum mendapatkan metode penghitungan yang tepat dan akurat, beserta data dan informasi yang dapat mendukung penghitungannya.

#### **2. Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan perkebunan dalam negeri**

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang), pada indikator ini kami belum mendapatkan data dan informasi dari sumber yang valid dan kredibel, jadi belum dapat dihitung prosentase tingkat komponen dalam negeri (N/A).

#### **3. Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan perkebunan**

Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan, pada indikator ini belum dapat dihitung komoditi atau produk yang dilakukan diversifikasi, yaitu dijadwalkan pada akhir tahun 2020.

No	Tujuan atau Sasaran Progress	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan
1	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri hasil hutan dan perkebunan	1 Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi	1.88	N/A	%
2	Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan perkebunan dalam negeri	1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	54.75	57.33	%
		2 Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan	2.00	N/A	Diversifikasi Produk
3	Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan perkebunan	1 Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	54.75	-7.80	%
		2 Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor	9.25	3.92	%
		3 Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri non migas	8.75	11.87	%

### **Sasaran Strategis Perspektif Learn and Growth**

Sasaran strategis perspektif *stakeholders* mempunyai 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, meliputi:

#### **1. Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional**

Sasaran strategis ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan

kebutuhan pembangunan industri maka perlu dilakukan dilakukan berbagai upaya untuk mencapainya, antara lain menyusun program dan kegiatan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan. Bila perencanaan kegiatan dilakukan dengan optimal maka pemblokiran anggaran dapat berkurang. Pemblokiran anggaran menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran. Sasaran strategis terlaksananya perencanaan/program penganggaran dan pengendalian yang berkualitas diukur berdasarkan persentase anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang dibintangi dalam catatan halaman IV DIPA karena kesalahan dalam perencanaan, dengan target kurang dari 20% anggaran yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA. Realisasi IKSS tersebut sebesar 4,51%. Pencapaian target ini dilakukan melalui pembahasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perindustrian.

## 2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Indikator ini digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja direktorat Hasil Hutan dan Perkebunan dalam melaksanakan tertib administrasi dan kelengkapan dokumen pada periode tahun 2020, sehingga pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran sesuai dengan perencanaan dan terdokumentasi dengan lengkap

No	Tujuan atau Sasaran Progress	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Satuan	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	100	100	%
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	77	71.26	Nilai

## B. Analisis Capaian Kinerja Rencana Strategis Direktorat IHHP Tahun 2020

Berdasarkan dokumen perencanaan strategis (Renstra) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, secara umum capaian kinerja terhadap dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel III.10. Realisasi Indikator Kinerja Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020**

Kode	No	Tujuan atau Sasaran Progress	Indikator Kinerja	2020				
				Target	Realisasi	Capaian	Satuan	
<b>Tujuan</b>								
	1	Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional	1	Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan	-0.57	-3.03	19%	%
			2	Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional	1.50	1.38	92%	%
			3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	3.17	2.77	87%	Juta Orang
			4	Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	22.60	19.10	85%	USD Milyar
<b>Perspektif Stakeholder</b>								
Kode	No	Tujuan atau Sasaran Progress	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian	Satuan	
	1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil	1	Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan	2.25	2.00	89%	%

		hutan dan perkebunan		perkebunan terhadap total pekerja				
			2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan perkebunan	50.2	107.0	213%	Juta Rupiah/Orang/Tahun
			3	Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan	14.93	13.08	88%	Rp Trilyun
<b>Perspektif Customer</b>								
<b>Kode</b>	<b>No</b>	<b>Tujuan atau Sasaran Progress</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Satuan</b>		
	1	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri hasil hutan dan perkebunan</b>	1	Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi	1.88	N/A	-	%
	2	<b>Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan perkebunan dalam negeri</b>	1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	54.75	57.33	105%	%
			2	Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan	2.00	N/A	-	Diversifikasi Produk
	3	<b>Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan perkebunan</b>	1	Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	54.75	-7.80	-14%	%
			2	Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan	9.25	3.92	42%	%

				perkebunan terhadap total ekspor				
			3	Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri non migas	8.75	11.87	136%	%
<b>Perspektif <i>Learn &amp; Growth</i></b>								
<b>SK6</b>	<b>No</b>	<b>Tujuan atau Sasaran Progress</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realiasi</b>		<b>Satuan</b>	
	1	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan</b>	1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	100	100	100%	%
			2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	77	71.26	93%	Nilai

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020, target jangka menengah untuk setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional. Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan ada di angka -3.03%, Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional mencapai 1,38%, Jumlah tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan mencapai 2,77 Juta Orang,

serta Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan mencapai Usd 19,10 Milyar, diharapkan dari capaian berikut dapat ditingkatkan setiap tahunnya

2. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan dan perkebunan. Hal ini memiliki indikator Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total pekerja di angka 2%, Produktivitas tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan perkebunan di angka 107juta, Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan di angka 13.08 Trilyun Rupiah, diharapkan dari capaian berikut dapat ditingkatkan setiap tahunnya
3. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri hasil hutan dan perkebunan yang memiliki indikator Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi yang saat ini masih belum didapat data pencapaiannya
4. Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan perkebunan dalam negeri yang memiliki indikator Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) di angka 57,33% dan Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan yang masih belum diketahui datanya, diharapkan dari capaian berikut dapat ditingkatkan setiap tahunnya
5. Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan perkebunan yang memiliki indikator Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan di angka -7.8%, Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor di angka 3.92%, serta Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri non migas di angka 11.87% diharapkan dari capaian berikut dapat ditingkatkan setiap tahunnya
6. Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memiliki indikator Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional di angka 100% dan 'Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri



Hasil Hutan dan Perkebunan di angka 93% diharapkan dari capaian berikut dapat ditingkatkan setiap tahunnya

Secara umum pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis 2020 mengalami dinamika yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III. 11. Capaian Indikator Kinerja Rencana Strategis Berdasarkan Perspektif**

No.	Perspektif	Tahun
		2020
1	Perspektif <i>Tujuan</i>	71%
2	Perspektif Stakeholder	130%
3	Perspektif Customer	67%
4	Perspektif Internal Process	96%
Rata-rata		91%

Sasaran strategis “meningkatnya daya saing industri Hasil Hutan dan Perkebunan” diukur dengan “tersusunnya rancangan standar produk industri hasil hutan dan perkebunan” yang diwujudkan dengan penyusunan/ penyempurnaan RSNI dibidang industri pulp & kertas (10 judul), industri furniture (4). Sedangkan “Partisipasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam forum/sidang/promosi/ pameran dalam negeri maupun luar negeri” diukur dengan keikutsertaan pemerintah dalam hal ini delegasi dari Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam forum/sidang/ promosi/pameran di dalam maupun luar negeri.

Dengan telah tersusunnya 14 RSNI produk industri hasil hutan dan perkebunan dimaksud, Dan dengan ikut berpartisipasinya Dit. IHHP dalam forum/sidang/promosi/ pameran dalam negeri maupun luar negeri, maka telah tercapai sesuai target.

Secara umum pencapaian sasaran strategis berdasarkan pembangunan jangka menengah mengalami kesamaan dari tahun ke tahun.

**C. Analisis Capaian Kinerja Program Prioritas Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mengemban tugas untuk melaksanakan program prioritas yang diamanahkan dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang diturunkan melalui Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2020. Adapun Program Prioritas tahun 2020 tertera pada tabel berikut.

**Tabel III. 14. Realisasi Target Program Prioritas Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2019**

Program/Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Jumlah rekomendasi	3 rekomendasi	3	100
	Sni Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Jumlah RSNI	15 RSNI	15	100
	Rancangan Skkni/kkni Yang Disusun/direvisi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Jumlah RSKKNI	2 RSKKNI	2	100
	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional	Jumlah Rekomendasi	3 Rekomendasi	3	100
	Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha	Jumlah Dokumen	3 dokumen	3	100
	Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan peningkatan daya	Konsep	2 Konsep	2	100

	<b>Peningkatan Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas</b>	Pedoman	1 Pedoman	1	100
--	--	---------	-----------	---	-----

Berdasarkan Program Prioritas Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020, berikut aktivitas yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran dan indikator kinerja program prioritas sebagai berikut.

### **1. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan.**

Penurunan harga karet dalam beberapa tahun terakhir ini sangat menekan kesejahteraan petani sebagai mayoritas penghasil karet alam. Beberapa faktor turut menjadi penyebab penurunan harga, terutama akibat melesunya perekonomian global, penurunan harga minyak dan terjadinya kelebihan pasokan karet di pasar dunia.

Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah untuk mendongkrak harga karet. Antara lain tiga negara produsen utama karet alam, yaitu Indonesia, Thailand dan Malaysia yang tergabung dalam organisasi *International Tripartite Rubber Council* (ITRC) telah menerapkan kesepakatan pengurangan ekspor melalui *Agreed Export Tonnage Scheme* (AETS). Langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah peningkatan konsumsi karet didalam negeri melalui percepatan hilirisasinya dimana aspal karet merupakan salah satu produk hilir yang paling potensial untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sebagai langkah partisipatif mendukung program pengembangan infrastruktur di dalam negeri, sejak tahun 2016 telah dilaksanakan program pengembangan aspal karet melalui pembangunan Pilot Plant aspal karet pada tahun 2016, serangkaian uji gelar pada rentang waktu tahun 2016-2018, penyusunan *Feasibility Study* pada tahun 2017 serta penyusunan *Business Plan Industri Aditif Aspal Karet* Pada tahun 2018 yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pelaku bisnis dan para pemangku kebijakan terkait untuk pengembangan aspal karet di dalam negeri.

Perkembangan industri furnitur dunia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tujuh negara yang termasuk major income countries (US, Italia,

Jerman, Jepang, Perancis, Kanada, Inggris) memasok 58% dari total produksi dunia. *Middle and low income countries* termasuk China, Polandia, Brazil dan Vietnam memasok 42% dari total produksi dunia. Ada tiga negara yaitu China, Polandia dan Vietnam yang mengalami peningkatan produksi sangat cepat sebagai hasil dari pengembangan investasi yang berhasil. Importir utama furniture adalah US, Jerman, Perancis dan Inggris.

Industri furnitur (kayu dan rotan) di Indonesia merupakan salah satu kelompok pada industri hasil hutan yang mempunyai nilai tambah paling tinggi. Industri ini telah ditetapkan sebagai inti pada industri pengolahan kayu. Hampir semua daerah di Indonesia terdapat industri furniture (mebel), namun konsentrasi terbesar untuk industri furniture kayu berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan untuk furniture rotan di Cirebon – Jawa Barat.

Pada tahun 2010 ekspor produk furniture Indonesia mencapai USD 1.430,57 juta. Pada tahun 2011 meningkat menjadi USD 1688,53 juta namun pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 1.505,75, begitu pula pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan sebesar 1,39 %. Nilai ekspor kembali membaik pada 2014 menjadi 1.508,66 %. Pada tahun 2015 hingga 2016, terjadi penurunan berturut-turut sebesar 2,45% dan 5,52 persen. Nilai ekspor produk furniture Indonesia mulai kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar 1,77% menjadi USD 1.413,45 juta. Pada tahun 2018, nilai ini tumbuh 3,53 persen menjadi USD 1.465,24 juta. Kemudian, pada tahun 2019, ekspor produk furniture kembali meningkat sebesar 1,66 % menjadi USD 1.478,24 juta. Per Agustus 2020, nilai ekspor furniture telah mencapai USD 1.024,46 juta.

Lokus pengembangan industri furniture ditetapkan di Jawa Tengah. Permasalahan utama yang dihadapi industri pengolahan kayu hilir (khususnya industri furniture) adalah masalah bahan baku (baik secara kuantitas maupun kualitas), masalah legalitas kayu, masalah SDM (terutama bidang desain dan teknik produksi, termasuk *finishing*), tuntutan sertifikasi lingkungan (termasuk ekolabel), permesinan yang sudah tua, dan lain-lain.

Cadangan minyak dan gas bumi sebagai sumber utama energi nasional saat ini jumlahnya relatif terbatas dan semakin menipis, serta bersifat tak terbarukan (*non-renewable resources*). Menurut perhitungan, apabila Indonesia tidak menemukan sumber minyak baru, dan dengan tingkat eksplorasi seperti yang dilakukan pada saat ini, maka cadangan minyak dan gas tersebut, akan habis dalam 15 – 20 tahun mendatang. Oleh karena itu, perlu dikembangkan bahan bakar nabati (biodiesel dan bioetanol) yang bahan bakunya bersifat terbarukan (*renewable resources*) yang banyak tersedia di Indonesia, seperti: tetes tebu, nira, singkong, sorgum, kelapa sawit, jarak pagar, dan lain-lain.

Sebagai bentuk partisipasi industri hasil hutan dan perkebunan pada berbagai event sidang dan pameran yang berskala internasional baik di dalam dan luar negeri. Event sidang yang dilakukan baik didalam dan luar negeri merupakan bentuk partisipasi IHHP dalam fora kerjasama internasional. Berbagai bentuk kerjasama baik bilateral, regional maupun multilateral pada saat ini gencar dilakukan, dalam rangka menggalang peningkatan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Hal ini merupakan bentuk respon dari perkembangan perdagangan bebas dunia yang bergerak sangat cepat berdampak pada terjadinya persaingan dagang yang semakin ketat.

Dalam merespon perkembangan tersebut, berbagai negara berusaha untuk meningkatkan daya saing produk-produk andalannya, dan pada saat yang bersamaan melakukan negosiasi dengan negara-negara mitra kerja, untuk memperlancar perdagangan antar negara. Dalam upaya mengembangkan pasar, Indonesia melakukan perundingan-perundingan dengan berbagai mitra kerja baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Perundingan-perundingan tersebut antara lain adalah dalam forum kerjasama ASEAN, forum kerjasama negara-negara D-8, forum perdagangan dunia (WTO), forum kerjasama Tri Partit, dsb.

Sebagai konsekuensi kebijakan kerjasama bilateral dan multilateral dengan baik AFTA, ASEAN, Eropa, Australia maupun WTO, juga menyiapkan rencana kerjasama bilateral maupun multilateral dengan EROPA, AMERIKA & AFRIKA; Indonesia perlu memonitor, mencermati, mempelajari

bagaimana penerimaan pasar produk-produk industri hasil hutan dan perkebunan Indonesia di luar negeri, bagaimana skema negara mitra maupun calon mitra yang sudah diterapkan terhadap produk-produk industri, utamanya produk industri olahan antara maupun hilir turunan dari komoditi hulu agro (hutan maupun pertanian). Di samping itu untuk mengikuti perkembangan dinamika bisnis internasional terkait industri hasil hutan dan perkebunan dlm rangka mengantisipasi permasalahan yang terjadi dan memperjuangkan kepentingan industri nasional. Sebagai contoh : Sidang TPRB WTO, Sidang TBT WTO, SWGPO, UNFCCC, Green Campaign Sawit & Produk Turunannya, dll.

Industri turunan sawit dan turunan minyak atsiri sebagai bagian dari industri hasil hutan dan perkebunan (IHHP) mempunyai peranan penting dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Dengan peran tersebut diharapkan produk-produk IHHP mampu bersaing di pasar internasional, dan memberikan kontribusi menghasilkan devisa negara.

dengan kegiatan yang dilakukan meliputi:

a. Penyusunan rekomendasi implementasi konsep rantai alur bahan baku industri pengolahan kayu dan rotan

1) Rekomendasi sektor industri furniture dan pengolahan kayu, yaitu penyusunan draft Surat Keputusan Bersama (4 Kementerian); KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, MENTERI PERINDUSTRIAN, MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI KEUANGAN, dengan judul SKB:

- INTEGRASI DATA DAN INFORMASI SEKTOR HULU, HILIR, SERTA PERDAGANGAN PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

b. Penyusunan rekomendasi implementasi industri aditif aspal karet

- 1) Dilaksanakan monitoring dan identifikasi hambatan dan kendala pada industri crumb rubber sebagai pendukung industri aspal karet (additive aspal karet).
  - c. Penyusunan rekomendasi insentif fiskal industri hasil hutan dan perkebunan
    - 1) Telah disusun draft Permenperin untuk program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri furniture dan pengolahan kayu
- 2) **SNI Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan.**

Output Output ini memiliki 14 (lima belas) volume RSNI yang harus disusun rancangannya, yaitu: 10 RSNI produk pulp dan kertas, dan 4 RSNI produk furnitur.

dengan kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan RSNI sektor industri hasil hutan dan perkebunan:
 

Penyusunan/Penyempurnaan dan implementasi Rancangan Standar industri pulp dan kertas, 10 Judul adalah:

  - 1. Kertas kemas - Bagian 1: Kertas liner dan kertas medium
  - 2. Kertas cetak salut
  - 3. Kertas medium - Cara uji ketahanan tekan datar setelah penggelombang di laboratorium (A-flute)
  - 4. Kertas medium – Ketahanan tekan tepi medium gelombang (metode pelat lentur)
  - 5. Kertas dan karton - Cara uji ketahanan tarik setelah direndam air
  - 6. Kertas dan karton - Cara uji daya tembus udara dan daya tahan udara (rentang medium) – Bagian 5: Metode Gurley
  - 7. Kertas, karton, pulp dan cellulose nanomaterial – Cara uji kadar abu pada 900 °C
  - 8. Kertas, karton, pulp dan cellulose nanomaterial – Cara uji kadar abu pada 525 °C
  - 9. Lindi hitam – Cara uji padatan total

- 10. Lindi hitam – Cara uji lindi hitam proses soda dan proses sulfat.
- Penyusunan/Penyempurnaan dan implementasi Rancangan Standar industri furniture dan pengolahan kayu, 4 Judul adalah:
  - 1. Furnitur Kantor – Kursi Kerja Kantor – Metode Pengujian untuk penentuan kekuatan dan ketahanan stabilitas
  - 2. Furnitur – Test untuk surface finish – Bagian 2 Penilaian Ketahanan terhadap wet heat
  - 3. Furnitur – Test untuk surface finish – Bagian 3 Penilaian Ketahanan terhadap dry heat
  - 4. Furnitur – Kursi Tinggi Anak - anak – Bagian 2 Metode pengujian

Realisasi keuangan yang ditargetkan sebesar 92,82 persen terealisasi sebesar 88,75 persen.

Akuntabilitas keuangan untuk Output II, SNI Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan, jika dilihat dari segi realisasi keuangan tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2020 dari yang ditargetkan sebesar 82,69 persen terealisasi sebesar 88,75 persen. Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 100 persen terealisasi sebesar 100 persen.

Jika dibandingkan dari segi realisasi keuangan tahun 2019 periode yang sama dari yang ditargetkan 48 persen terealisasi 26,04 persen sedangkan dari segi realisasi fisik dari 25 persen yang ditargetkan terealisasi 19,26 persen.

## **2. Rancangan SKKNI/kkni Yang Disusun/direvisi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan**

Dalam rangka pembangunan tenaga kerja yang kompeten, Pemerintah Indonesia menyusun Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk menjadi pedoman dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga kerja Indonesia. SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek Pengetahuan (*knowledge*), Keterampilan dan/atau Keahlian (*skills*) serta Sikap kerja (*attitude*) yang relevan dengan



pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga kerja yang disiapkan melalui SKKNI diharapkan dapat memiliki kemampuan terukur dan tertelusur, memiliki kompetensi, dan memiliki produktivitas kerja, Penyusunan RSKKNI merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan instrumen untuk memastikan peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan tenaga kerja asing di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Sasaran komponen yang ingin dicapai pada triwulan IV ini adalah:

- Telah disusun 2 judul RSKKNI sektor industri hasil hutan dan perkebunan, yaitu:
  - Judul RSKKNI sektor industri pulp dan kertas:
    - - PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS BIDANG INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS (KARTON)
  - Judul RSKKNI sektor industri furniture dan pengolahan kayu:
    - - PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI FURNITUR BIDANG INDUSTRI FURNITUR KAYU

## **2. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional.**

Output pada kegiatan ini sebanyak 3 (tiga) Rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan jaminan pasokan bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan melalui fora kerjasama internasional Sub-sub kegiatan yang terkait kegiatan rekomendasi yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah:

- i. Telah disusun satu kajian Skema Insentive Peningkatan Ekspor Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan melalui rekomendasi sikap dan tanggapan Kemeneperin terkait ijin ekspor penambahan luas

penampang kayu, serta proyeksi kebutuhan kayu dilihat dari sudut pandang produksi dan konsumsi industri furniture dan kayu olahan untuk tahun 2021.

- ii. Telah dilakukan penyusunan posisi runding industri pulp dan kertas dalam AHTN 2020.
- iii. Telah diselesaikan Penyusunan konsep desain industri pengolahan kayu dan rotan dalam rangka industrial intelligence, disertakan dengan prototipe furniture.

### **3. Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha.**

Pemerintah (dalam hal ini Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Ditjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian) mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan fasilitasi-fasilitasi dan pembinaan kepada dunia usaha yang berada dibawah binaannya melalui pelaksanaan program-program. Di lain pihak, kemampuan pemerintah sangat terbatas, terutama dari segi pendanaan. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu mekanisme perencanaan program yang efektif dan terarah, melalui pelibatan asosiasi, dunia usaha, lembaga-lembaga litbang dan instansi terkait serta perguruan tinggi, agar program-program yang disusun benar-benar efektif dan mengenai sasaran sehingga dunia usaha (industri) mampu bertahan menghadapi persaingan yang semakin ketat serta dapat mengembangkan usahanya sebagaimana yang diharapkan, dalam rangka penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perolehan devisa dan kontribusi dalam pembentukan PDB. Sub-sub kegiatan yang terkait kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah:

Sasaran komponen yang dicapai pada triwulan IV ini adalah:

- i. Telah dilakukan rapat Koordinasi Penyusunan Program tahun anggaran 2021 dalam rangka sinkronisasi dan elaborasi program kegiatan Dit. IHHP, balai, kementerian terkait, dan dunia usaha
- ii. Pengumpulan data dan menghadiri rapat-rapat terkait Koordinasi Penyusunan Program tahun anggaran 2021 dalam rangka sinkronisasi dan elaborasi program kegiatan Dit. IHHP, balai, kementerian dan dinas terkait serta dunia usaha

- iii. Telah disusun Skema *Business Matching* Dalam Rangka Penurunan Impor Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan melalui perbaikan rantai alur bahan baku dan bahan penolong industri furniture dan kayu olahan
- iv. Telah dilakukan Sosialisasi Peningkatan prosentase TKDN kepada industri pengolahan kayu dan furniture
- v. Telah dilakukan penyusunan Outlook Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Tahun 2021 Dan Sinkronisasi HS-KBLI.

#### **4. Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan**

Indonesia menempatkan industri atsiri sebagai industri warisan bangsa (*national heritage*) yang telah diusahakan sejak zaman kerajaan Majapahit – Sriwijaya hingga penjajahan Belanda – Jepang; dengan kemampuan produksi produk atsiri yang sangat besar dan beragam. Namun, kualitas dan kuantitas jenis industri atsiri, khususnya industri penyulingan atsiri tidak banyak mengalami banyak perubahan karena sebagian besar unit pengolahan minyak atsiri dimiliki petani rakyat dengan teknologi sederhana/tradisional dan kapasitas produksi terbatas.

Dalam lingkungan pemasaran internasional terdapat 150 jenis minyak atsiri yang diperdagangkan 40 jenis di antaranya diproduksi di Indonesia, khususnya minyak atsiri eksotis. Pasar ekspor atsiri terbesar di dunia berada di negara Perancis dimana pasokan minyak atsiri berasal dari India, Singapura, China; beberapa diantaranya transshipment dari Indonesia. Beberapa tanaman atsiri asal Indonesia yang diminati pasar ekspor dunia adalah Minyak Nilam, Sereh Wangi, Cengkeh, Jahe, Pala, Lada, Kayu Manis, Cendana, Melati, Akar Wangi, Kenanga, Kayu Putih dan Kemukus. Negara Indonesia tercatat sebagai pengeksport minyak nilam terbesar di dunia namun sebagian besar berupa produk setengah jadi/ belum produk hilir, dengan anggaran Kegiatan Konsep Pengembangan Sistem Logistik Kayu Nasional dimaksudkan untuk mewujudkan sistem logistik kayu nasional yang terintegrasi:

- i. Telah dilaksanakan seluruh rangkaian penyusunan draft permenperin terkait PIMAR dalam rangka pengembangan industri minyak atsiri

- ii. Telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* II Kajian Teknoekonomi Pulp Serai Wangi.

#### **5. Peningkatan Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas.**

Industri pulp dan kertas nasional berjumlah 88 perusahaan, dimana 48 perusahaan merupakan industri kertas yang menggunakan kertas bekas dengan kapasitas terpasang sekitar 8.2 juta ton pada tahun 2018 dan jumlah tenaga kerja yang diserap secara langsung sekitar 40 ribu orang. Industri pulp dan kertas merupakan industri yang strategis, dengan kontribusi terhadap total ekspor Indonesia sebesar 4% atau sekitar 7,2 milyar USD.

Industri kertas beroperasi dengan menggunakan bahan baku berupa pulp dalam negeri dan/atau luar negeri, campuran pulp dan kertas daur ulang atau seluruhnya berbahan baku kertas daur ulang. Kebutuhan kertas daur ulang (HS Code 4707.10.00.10, 4707.20.00.10, 4707.30.00.10, 4707.90.00.10) secara nasional berdasarkan kapasitas terpasang sebesar 9,4 juta ton/tahun, namun saat ini penggunaan kertas bekas oleh industri hanya sebesar 6,4 juta ton dimana sumber kertas bekas tersebut 3,2 juta ton/tahun dapat disediakan dalam negeri, dan sisanya berasal dari impor. Sub-sub kegiatan yang terkait kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah:

- i. Telah diselesaikan tahapan Penyusunan Pedoman Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas.
- ii. Monitoring ke Industri terkait SOP penanganan kertas bekas sebagai bahan baku industri kertas.

Secara umum pencapaian program/kegiatan prioritas tahun 2020 adalah sebesar 100 persen.

#### **D. Akuntabilitas Keuangan Direktorat IHHP Tahun 2020**

Pada tahun anggaran 2020 ini Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memperoleh alokasi anggaran sebesar **5.426.866.000,-** (Lima milyar empat ratus

dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) setelah dilakukan revisi dalam rangka penanganan dampak pandemi covid-19. Selanjutnya dilakukan penyesuaian anggaran lanjutan, menjadi sebesar **Rp 4.823.672.000,-** (Empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Anggaran yang terserap pada Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp 4.465.405.397** atau sebesar **92,57 persen**, dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel. III. 15. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis  
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2020**

No	Tujuan atau Sasaran Progres	Indikator Kinerja	Kegiatan	T	R	C	
	Tujuan						
1	Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional	1	Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan	<i>Penyusunan Rekomendasi Implementasi Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan</i>	127.672.000	122.110.973	95,64
		2	Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional	Sni Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	885.956.000	786.280.463	88,75
		3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	<i>Penerapan Budaya 5 K Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	98.175.000	90.110.981	91,79
		4	Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	<i>Penyusunan Rekomendasi Terkait Posisi Runding Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Pada Forum Kerjasama Internasional</i>	131.729.000	96.550.359	73,29
No	Tujuan atau Sasaran Progres	Indikator Kinerja					
1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan dan perkebunan	1	Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total pekerja	<i>Identifikasi Isu Aktual Industri Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	273.134.000	267.431.813	97,91
		2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan perkebunan	Rancangan Skkni/kkni Yang Disusun/direvisi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	581.879.000	560.920.834	96,40
		3	Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan	Penyusunan Rekomendasi Insentif Fiskal Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	414.496.000	369.713.818	89,20

No	Tujuan atau Sasaran Progres	Indikator Kinerja				
1	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri hasil hutan dan perkebunan	1 Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi	Dokumen Program, Evaluasi Dan Pelaporan	1.023.644.000	981.244.991	95,86
2	Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan perkebunan dalam negeri	1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	Penyusunan Rekomendasi Implementasi Industri Aditif Aspal Karet	232.968.000	214.387.619	92,02
		2 Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan	Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	322.994.000	320.463.748	99,22
3	Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan perkebunan	1 Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	Penyusunan Konsep Desain Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Dalam Rangka Industrial Intelligence	378.955.000	348.391.055	91,93
		2 Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor	Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	307.904.000	272.947.463	88,65
		3 Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri non migas	<i>Peningkatan Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas</i>	317.300.000	302.283.093	95,27
No	Tujuan atau Sasaran Progres	Indikator Kinerja				
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri	1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	351.556.000	344.341.057	97,95
		2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	398.954.000	369.472.121	92,61

<p><b>Hasil Hutan dan Perkebunan</b></p>	<p>Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan</p>				
--	---	--	--	--	--

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memiliki 1 (satu) sasaran strategis yang dilihat dari sisi perspektif tujuan dengan 4 (empat) Indikator Sasaran Strategis (IKSS), 1 (satu) sasaran strategis yang dilihat dari perspektif pemangku kepentingan dengan 3 (tiga) Indikator Sasaran Strategis (IKSS), 3 (tiga) sasaran strategis dari perspektif customer dengan 6 (enam) Indikator Sasaran Strategis, dan 1 (satu) sasaran dari perspektif internal proses dengan 1 (satu) Indikator Sasaran Strategis, serta 1 (satu) sasaran dari learn and progress dengan 2 (dua) Indikator Sasaran Strategis dengan IKU dan targetnya masing – masing. Dan sasaran beserta indikatornya telah terjabarkan dalam kontrak kerja tahunan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (Perjanjian Kinerja).
2. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terus berkoordinasi dengan instansi terkait diantaranya Kementerian PUPR, Puslit Karet, BSN, BPPI, dinas-dinas terkait di daerah, serta dunia usaha dalam rangka menjalankan program prioritas nasional terutama mengenai pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan di tahun 2020 diantaranya Penyusunan Konsep

Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Serta Konsep Desain Industri Furniture Yang Diterima Pasar Internasional, Pengembangan Proses Produksi Dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon yang bekerja sama dengan Balai Besar Pulp Kertas, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dibidang industri hasil hutan dan perkebunan, dan penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi) dibidang industri hasil hutan dan perkebunan.

3. Berdasarkan data dari BKPM dan diolah oleh Pusdatin Kementerian Perindustrian yang merupakan data penambahan jumlah IUI yang terbit sepanjang 2020 terdapat . Sedangkan pada tahun 2018 total jumlah unit usaha industri hasil hutan dan perkebunan sebanyak 961 unit usaha yang merupakan data listing sensus ekonomi. Sehingga pada tahun 2019 total jumlah unit usaha industri hasil hutan dan perkebunan sebanyak 8.518 unit usaha. Capaian indikator “Jumlah unit industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh” ini sebesar 9,09 persen. Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 356 ijin investasi.
4. Berdasarkan data dari BKPM/ LKPM dan diolah oleh Pusdatin Kementerian Perindustrian terdapat penanaman modal dalam negeri sebesar 9.93 Trilyun Rupiah dan penanaman modal asing sebesar Usd 2,25 Milyar sedangkan berdasarkan data dari BKPM tahun 2019 realisasi investasi sebesar 16,45 Triliyun
5. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor dengan target 14,4%..
6. Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan sebesar 50.2 Juta Rupiah Perorang Tahun.
7. Secara umum capaian kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada tahun 2020 capaian kinerjanya adalah:

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	Realisasi
<b>TUJUAN</b>					
Tj	Meningkatnya peran industri hasil hutan dan	1. Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan	2,79	%	(15,12)*



	perkebunan dalam perekonomian nasional	2. Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional	1,38	%	1,66*
		3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	3,3	Juta Orang	0,90*
		4. Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	16,25	USD Milyar	17,42*
<b>PERSPEKTIF STAKEHOLDER</b>					
SS1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	1. Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total pekerja	2,57	%	0.67*
		2. Produktivitas tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan perkebunan	51,2	Juta Rupiah/Orang/Tahun	57,11*
		3. Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan	45,38	Rp Trilyun	130,48
SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	1. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi	2,05	%	N/A
SS3	Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan perkebunan dalam negeri	1. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	54,75	%	57,33
		2. Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan	2	Diversifikasi Produk	N/A
SS4	Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan dan perkebunan	1. Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	9,25	%	(3,92)*
		2. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor	8,75	%	11,87*
		3. Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri non migas	2,23	%	N/A

<b>PERSPEKTIF LEARN &amp; GROWTH</b>					
L1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	1. Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan rencana strategis	100	%	100
		2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	77	Nilai	71,26

\*Data aktual yang tersedia sampai bulan November 2020

8. Pada tahun anggaran 2020 ini Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memperoleh alokasi anggaran sebesar **5.426.866.000,-** (Lima milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) setelah dilakukan revisi dalam rangka penanganan dampak pandemi covid-19. Selanjutnya dilakukan penyesuaian anggaran lanjutan, menjadi sebesar **Rp 4.823.672.000,-** (Empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Anggaran yang terserap pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan realisasi E-Monitoring APBN dan ALKI sampai dengan akhir tahun sebesar **Rp 4.465.405.397**
9. Capaian keuangan sebesar 92,57 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen sehingga berdasarkan sektor keuangan maka kinerja direktorat adalah 92,57 persen.
10. Analisis capaian indikator kinerja dapat dihitung bahwa realisasi fisik mencapai 75,75 persen dari yang ditargetkan sebesar 100 persen. Sehingga berdasarkan kinerja fisik, maka kinerja direktorat adalah 100 persen.

## **B. PERMASALAHAN DAN KENDALA**

Dari hasil evaluasi kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2020, pelaksanaan kegiatan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tidak terlepas dari kendala dan hambatan, antara lain yaitu:

1. Proses Pelaksanaan revisi anggaran dengan menambahkan jumlah output pada kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, namun setelah

dilakukan revisi anggaran dan penambahan output, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan justru melakukan blokir anggaran, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan, yang berdampak pada prosentase realisasi keuangan dan realisasi fisik tidak optimum.

2. Beberapa indikator sasaran tidak dapat tercapai yang disebabkan beberapa faktor makro yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja ekonomi secara umum dan kinerja industri secara khusus. Perdagangan internasional, kondisi geopolitik regional maupun global, fluktuasi harga minyak dunia, isu lingkungan, merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja industri yang berimbas pada produktivitas, kinerja ekspor, dan kontribusi terhadap PDB.
3. Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat karena adanya pandemic covid 19 yang berdampak pada masyarakat, pelaku usaha bahkan Pemerintah sehingga terjadi koreksi yang cukup dalam pada beberapa sector

#### 4. **REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT**

1. Melakukan sinkronisasi dan penyelarasan program kegiatan dengan Renstra periode yang baru (2020 – 2024).
2. Membuat SOP mengenai administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan dimana maksimal 7 hari kerja setelah kegiatan tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ketepatan pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan jadwal perencanaan.
3. Serta dalam rangka mengembangkan industri hasil hutan dan perkebunan hal-hal yang dapat dilakukan adalah pengembangan hilirisasi industri, penguatan standar melalui SNI Wajib, SKKNI, dan menumbuhkan industri-industri baru seperti produksi masterbatch untuk aditif aspal karet, pengembangan industri serat rayon, meningkatkan *recovery rate* kertas bekas di dalam negeri untuk bahan baku produksi kertas, dan pengembangan hilirisasi industri kelapa sawit.

## PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan  
 Tahun : 2020

No	Tujuan atau Sasaran Progress	Indikator Kinerja	Kegiatan	2020			T	R	C	Keterangan
	Tujuan			Target	Realisasi	Capaian				
1	Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional	1	Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan <i>Penyusunan Rekomendasi Implementasi Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan</i>	-0.57	-3.03	19%	127.672.000	122.110.973	95,64	
		2	Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional <i>Sni Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	1.50	1.38	92%	885.956.000	786.280.463	88,75	
		3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri <i>Penerapan Budaya 5 K Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	3.17	2.77	87%	98.175.000	90.110.981	91,79	

		hasil hutan dan perkebunan									
		4	Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan <i>Penyusunan Rekomendasi Terkait Posisi Runding Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Pada Forum Kerjasama Internasional</i>	22.60	19.10	85%	131.729.000	96.550.359	73,29		
						71%					
<b>No</b>	<b>Tujuan atau Sasaran Progress</b>	<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Target</b>	<b>Realiasi</b>	<b>Capaian</b>					
1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri hasil hutan dan perkebunan	1	Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total pekerja <i>Identifikasi Isu Aktual Industri Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	2.25	2.00	89%	273.134.000	267.431.813	97,91		
		2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan perkebunan <i>Rancangan Skkni/kkni Yang Disusun/direvisi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	50.2	107.0	213%	581.879.000	560.920.834	96,40		
		3	Nilai realisasi investasi <i>Penyusunan Rekomendasi Insentif Fiskal Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	14.93	13.08	88%	414.496.000	369.713.818	89,20		

			industri hasil hutan dan perkebunan									
												130%
No	Tujuan atau Sasaran Progress	Indikator Kinerja		Target	Realisasi							
1	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri hasil hutan dan perkebunan	1	Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi	Dokumen Program, Evaluasi Dan Pelaporan	1.88	N/A	-	1.023.644.000	981.244.991	95,86		
2	Meningkatnya kemampuan industri hasil hutan dan perkebunan dalam negeri	1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	Penyusunan Rekomendasi Implementasi Industri Aditif Aspal Karet	54.75	57.33	105%	232.968.000	214.387.619	92,02		
		2	Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan	Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	2.00	N/A	-	322.994.000	320.463.748	99,22		
3	Meningkatnya penguasaan pasar industri hasil hutan	1	Pertumbuhan ekspor produk industri hasil	Penyusunan Konsep Desain Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Dalam Rangka Industrial Intelligence	54.75	-7.80	-14%	378.955.000	348.391.055	91,93		

	dan perkebunan	hutan dan perkebunan									
		2	Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor	Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	9.25	3.92	42%	307.904.000	272.947.463	88,65	
		3	Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri non migas	<i>Peningkatan Recovery Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas</i>	8.75	11.87	136%	317.300.000	302.283.093	95,27	
							67%				
<b>No</b>	<b>Tujuan atau Sasaran Progress</b>	<b>Indikator Kinerja</b>			<b>Target</b>	<b>Realiasi</b>					
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada	1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	100	100	100%	351.556.000	344.341.057	97,95	

	Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	kegiatan prioritas nasional							
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	77	71.26	93%	398.954.000	369.472.121	92,61